

**ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENGKOORDINASIAN OBJEK WISATA DANAU SIPIN
DI KOTA JAMBI**

SKRIPSI



Diajukan sebagai upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Hukum
Universitas Jambi

OLEH :

**SHERIN YULIA HUTAMI
NIM. H1A117052**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Analisis *Collaborative Governance* dalam Pengkoordinasian Objek Wisata
Danau Sipin di Kota Jambi

Nama : Sherin Yulia Hutami
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Nim : H1A117052

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen pembimbing 2
Untuk diujikan dalam Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 1 Desember 2022

Dosen Pembimbing I



Drs. H. Navarin Karim, M.Si.
NIP. 196004081986031006

Dosen Pembimbing II



Makmun Wahid, S.IP., M.A
NIP. 199012312019031017

LEMBAR PENGESAHAN

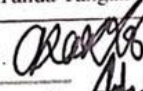
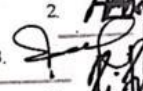
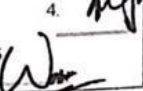
ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGKOORDINASIAN OBJEK WISATA DANAU SIPIN DI KOTA JAMBI

Nama : Sherin Yulia Hutami
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
NIM : H1A1171052

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 9 Desember 2022

Dewan Penguji Sidang Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. A. Zarkasih, S.H., M.Hum.	Ketua Pembahas	1. 
2.	Alva Beriansyah, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Ansorullah, S.H., M.H	Pembahas Utama	3. 
4.	Drs. H. Navarin Karim, M.Si	Anggota	4. 
5.	Makmun Wahid, S.IP., M.A	Anggota	5. 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Usman S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Ku Persembahkan Skripsi ini pada :

Kedua Orang Tuaku

Keluarga Besarku

Sahabat dan Teman Seperjuanganku

Dan Almamater Tercinta

LEMBAR MOTTO

“... Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”
(Surah Al baqarah 2 : 216)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Sherin Yulia Hutami
NIM : H1A117052
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Analisis *Collaborative Governance* dalam
Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi
Alamat : Jl. Raya Kasang Kota Karang RT 05 RW 02 Kecamatan
Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi
No. HP : 0895-7067-6012-3

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan

Sherin Yulia Hutami
H1A11705

ABSTRACT

Sherin Yulia Hutami, H1A117052, Analysis of Collaborative Governance in Coordinating Lake Sipin Tourism Objects in Jambi City. This study aims to find out and analyze Collaborative Governance carried out by the Jambi City Government, in this case the Jambi City Tourism and Culture Office regarding the Coordination of Lake Sipin attractions. This study uses a qualitative method. Data collection is done by observation, interviews, and documentation. The data that researchers use in this study are primary data and secondary data. The results of this study indicate that First, the Collaborative Governance Process has not gone well, there are several indicators that have not worked as in the Commitment Building Process. In this process, the efforts made are still not maximal because the ongoing process does not involve the community and efforts to build trust are difficult due to conflicting management claims between the agencies involved. Second, there are three inhibiting factors in collaborative relationships, namely social structure factors where there is no agreement for the division of labor for each party involved so that the Government is still dominated in collaboration. Cultural factor, namely the work culture is Top Down so that joint decisions are still made by the Government and do not involve the private sector and the community. The government's interest factor is that there are two management of the Sipin Lake tourism object in collaboration belonging to the Jambi Provincial Government and the Jambi City Government.

Keywords: Collaborative Governance, Tourism Objects, Coordination

INTISARI

Sherin Yulia Hutami, H1A117052, Analisis *Collaborative Governance* dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi mengenai Pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Proses *Collaborative Governance* belum berjalan dengan baik, ada beberapa indikator yang belum berjalan seperti pada Proses membangun komitmen. Pada proses ini, upaya yang dilakukan masih belum maksimal karena proses yang berjalan belum ada melibatkan masyarakat serta Upaya membangun kepercayaan yang sulit dilakukan karena adanya konflik klaim pengelolaan antar instansi terlibat. Kedua, faktor penghambat dalam hubungan kolaborasi ada tiga yaitu faktor struktur sosial dimana belum adanya perjanjian untuk pembagian kerja bagi masing-masing pihak terlibat sehingga masih dominasi Pemerintah dalam kolaborasi. Faktor Budaya yaitu budaya kerja bersifat *Top Down* sehingga keputusan bersama masih dilakukan oleh Pemerintah dan belum melibatkan swasta serta masyarakat. Faktor Kepentingan Pemerintah yaitu adanya dua pengelolaan objek wisata Danau Sipin dalam kolaborasi milik Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi.

Kata Kunci : ***Collaborative Governance*, Objek Wisata, Pengkoordinasian**

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahi rabbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis *Collaborative Governance* dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi”**. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Terselesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghanturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi hingga selesai. Atas dasar itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Navarin Karim, M.Si sebagai Pembimbing Skripsi I dan kepada Bapak Makmun Wahid, S.IP., M.A sebagai Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing, mengoreksi dan memberi masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc.,Ph.D., Rektor Universitas Jambi yang telah membina Universitas Jambi menjadi lebih baik lagi.
2. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kontribusi besar baik dalam bentuk motivasi maupun usaha untuk membangun Fakultas Hukum menjadi lebih baik.

3. Ibu Dr. Hj. Muskibah S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah banyak membantu memberikan informasi seputar urusan akademik kepada penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah mengarahkan dan mendukung dalam pendaftaran beasiswa di lingkup Universitas Jambi.
5. Bapak Dr. Arfa'I, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah bekerja keras dalam memajukan Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan
6. Bapak Makmun Wahid, S.IP., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang selalu memberikan akses, solusi, dan kemudahan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam melaksanakan Studi.
7. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H., selaku ketua pembahas yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi.
8. Bapak Ansorullah, S.H., M.H., selaku pembahas utama, yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Bapak Alva Beriansyah, S.IP., M.I.P. selaku sekretaris yang membantu penulis dalam memahami masukan dan persoalan yang dihadapi dalam penulisan.
10. Ibu Latifah Amir, S.H., M.H Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan menyetujui KRS pada setiap semester.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan berlangsung dan membimbing sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.
12. Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Jambi yang telah membantu penulis dalam pelayanan administrasi perkuliahan.
13. Teruntuk yang teristimewa, kepada Ayahanda Tugiman dan Ibunda Suyatmi yang telah memberikan pengorbanan terbesar dan motivator dalam hidup saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan. Tidak lupa teruntuk adik-adik tercinta Meisya Dwi Anjani dan Ananda Aqila Zahra serta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menjadi seseorang yang bisa dibanggakan.
14. Untuk sahabat saya yang telah memberikan semangat dan doa kepada saya Annisa Meyta Liyano, Azizah Hanum, Dita Meysela Eka Soraya, Dwi Safitri, Chika serta Fitrah yang selalu mendengarkan keluh kesah saya.

15. Untuk sahabat seperjuangan saya Adisty Vanoza Maharani, Hanifatin Khotimah, Maya Sari, Octari Anggaraini, Putri Ayu Varah Wijaya, Reni Anggraeni, Resta Bella Oktaviani, Ulan Sari, Yesi Elvi Cahyanti yang menjadi seseorang untuk memotivasi saya.
16. Untuk teman-teman Program Studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu hingga sekarang berjuang bersama demi mencapai gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritikan dan saran bersifat membangun sangat penulis harapkan. Selebihnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Jambi, Desember 2022

Penulis

Daftar Isi

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR MOTTO.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRACT	vi
INTISARI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan	10
1.4 Manfaat	10
1.5 Landasan Teori.....	11
1.6 Kerangka Berpikir	21
1.7 Metode Penelitian	22
1.7.1. Jenis Penelitian	22
1.7.2. Lokasi Penelitian.....	22
1.7.3 Fokus Penelitian.....	23
1.7.4. Sumber Data	23
1.7.5. Teknik Penentuan Informan.....	24
1.7.6. Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.7.7 Teknik Analisis Data	25

1.7.8 Keabsahan Data	26
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	27
2.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.....	27
2.1.1 Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.....	27
2.1.2 Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi	27
2.1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi	28
2.2 Kelompok Sadar Wisata Pulau Kembang	32
2.2.1 Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata Pulau Kembang	33
2.3 Lokasi Objek Wisata Danau Sipin.....	34
2.3.1 Kecamatan Danau Sipin.....	34
2.3.2 Kelurahan Sungai Putri	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
3.1 Proses <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi	36
3.2 Faktor Penghambat Hubungan <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin Di Kota Jambi	62
BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran.....	68
Daftar Pustaka.....	70
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar

1. Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi	29
2. Struktur POKDARWIS Pulau Kembang	33
3. Rapat Forum OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.....	39
4. Dialog tatap muka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dengan POKDARWIS Pulau Kembang.....	41
5. Pertemuan Dinas Pariwisata Kota Jambi dengan Masyarakat Danau Sipin RT 02 Kelurahan Buluran	42
6. Dialog Tatap Muka POKDARWIS dan Masyarakat sekitar objek wisata Danau Sipin.....	43
7. FGD Dinas Pariwisata Kota Jambi dan Masyarakat Danau Sipin	45
8. Koordinasi Dinas Pariwisata Kota Jambi dan Dinas Pariwisata Provinsi Jambi.....	46
9. Kerja Sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dengan Dinas Pariwisata Kota Jambi.....	47
10. Sosialisasi dari Dinas Pariwisata Kota dengan Pokdarwis	48
11. Kegiatan gotong royong masyarakat Danau Sipin	51
12. Penyerahan sertifikat kelayakan perahu wisata oleh Dinas Pariwisata Kota Jambi dengan Pokdarwis	52
13. Gotong royong Pokdarwis dan Masyarakat di Sekitar Danau Sipin	54
14. Pelatihan Sadar Wisata	56
15. Rapat Koordinasi Dinas Pariwisata Kota Jambi dengan Dinas Pariwisata Provinsi	58
16. Pertemuan Pokdarwis dan Masyarakat Danau Sipin	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	73
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	78
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Kesatuan mendistribusikan kekuasaan berdasarkan hubungan Pemerintah pusat dan daerah yang dikaitkan dengan sistem desentralisasi dan sistem sentralisasi ¹. Sistem desentralisasi yang diterapkan Indonesia bukan bertujuan untuk memisahkan hubungan antara Pemerintah pusat dan daerah, tetapi sebagai kerjasama bagi unit-unit pemerintahan dalam pengelolaan Negara. Adanya sistem desentralisasi dan sistem sentralisasi merupakan bagian dari asas Otonomi Daerah. Otonomi Daerah hadir sebagai bentuk respon Pemerintah atas berbagai tuntutan masyarakat terhadap tatanan penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan. Penyelenggaraan Pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Ada beberapa urusan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya yaitu urusan di bidang pariwisata yang menjadi urusan konkuren dan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota ². Pariwisata telah menjadi salah satu sektor besar yang memberikan dampak pemasukan bagi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan

¹ Sulistyarningsih, Tri. Krishno, Hadi., *Government Cooperation : Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata di Tanjung Kelayang, Bangka Belitung*, <http://eprints.umm.ac.id/37451/>, 2018, [diakses: 14 Juni 2021]

² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata dan dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Tidak hanya pariwisata di tingkat nasional saja yang mengalami kemajuan, tetapi juga pada tingkat provinsi maupun kabupaten berusaha untuk memanfaatkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Di antaranya yaitu Yogyakarta, Bali, Bandung, dan masih banyak kota serta provinsi di Indonesia. Pariwisata sebagai suatu hal yang penting dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, karena saat ini wisata sebagai suatu kebutuhan bagi setiap individu sehingga *trend* ini berdampak pada berbagai sektor di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu provinsi di Indonesia saat ini juga berusaha menjadikan sektor pariwisata daerah berbasis alam dan kearifan lokal sebagai sumber pendapatan daerah yaitu Provinsi Jambi. Beberapa pariwisata khas dari Provinsi Jambi yaitu Candi Muaro Jambi terletak di Kabupaten Muaro Jambi, GeoPark Merangin berada di Kabupaten Merangin, Gunung Kerinci, serta Danau Kaco di Kabupaten Kerinci, dan beberapa pariwisata di Kota Jambi yaitu Gentala Arasy yang menjadi ikon Provinsi Jambi, wisata edukasi hewan yaitu Taman Rimbo Zoo, serta tempat-tempat wisata buatan berbasis alam.

Pariwisata baru yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Jambi saat ini berupa inovasi wisata tengah kota. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2023. Pada Pasal 60 mengenai kawasan peruntukan wisata yaitu Danau Sipin menjadi salah satu tujuan untuk pengembangan wisata di Kota Jambi. Pengembangan Danau Sipin menjadi objek wisata berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam dan wilayah pinggir air. Diharapkan, dengan adanya pengembangan objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi dapat memberikan dampak bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar Danau Sipin. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Jambi. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara di Kota Jambi pada tahun 2019 sebesar 442.987 orang dan wisatawan lokal pada tahun 2019 sebesar 4.308 orang.³

Akses untuk masuk ke dalam objek wisata Danau Sipin, saat ini tidak dikenakan biaya karena belum ada pengelolaan secara resmi. Pengunjung hanya dikenakan biaya parkir dan biaya untuk menikmati wisata air di Danau Sipin. Lokasi Danau Sipin Kota Jambi terletak di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Panjang kawasan Danau Sipin sekitar 4.500 meter serta lebar kurang lebih 300 meter dan kedalaman hingga 2-6 meter.⁴ Memiliki potensi berupa panorama alam dengan kondisi air cukup tenang dan bentuk danau yang panjang melingkari seperti pulau. Letaknya di tengah kota sangat strategis juga

³ Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jambi, Data kunjungan wisatawan Tahun 2019 .

⁴ Ihsan Mohammad, Rosyid Gary Yuesa, Siregar Ade Perdana, *Strategi Positioning dan Citra Destinasi Objek Wisata Air Danau Sipin Jambi*, Jurnal Manajemen dan Sains, Vol 4 No 2, 2019, hlm 205

memiliki sarana dan prasarana mendukung seperti akses jalan memadai serta ketersediaan lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alam dan buatan.

Adanya potensi tersebut, Pemerintah Kota Jambi berupaya memanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan ruang publik mulai dari sarana wisata, perdagangan atau jasa, olahraga ,*Outdoor*, hingga kawasan ramah lingkungan. Adapun dalam upaya untuk mempertahankan pengelolaan tersebut, Pemerintah Kota Jambi belum begitu optimal. Hal Ini diakibatkan adanya klaim Danau Sipin yang juga kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi. Sehingga berpotensi munculnya ego sektoral terhadap pengembangan program pengelolaan wisata Danau Sipin.

Pada proses pengelolaannya, wisata Danau Sipin Kota Jambi memiliki beberapa masalah terkait konflik saling iri yang terjadi antara pemilik modal besar dan pemilik modal kecil di masyarakat yaitu pelaku jasa perahu motor dan perahu kecil. Konflik lainnya pada pengelolaan lahan parkir di kawasan wisata Danau Sipin Kota Jambi yang berujung pada kekerasan⁵. Belum adanya pengelolaan resmi terkait sistem parkir di Danau Sipin, menyebabkan terjadinya perebutan lahan parkir oleh masyarakat yang berujung pada aksi saling pukul.

Selain konflik pengelolaan wisata, pada tahap pembangunan objek wisata Danau Sipin seperti, pembebasan lahan tanah pribadi yang diwakafkan untuk pemakaman umum tetapi dibangun sebagai podium dan taman di pinggir Danau Sipin. Namun tanah tersebut berbatasan di atas tanah milik pemerintah. Berdasarkan masalah tersebut, perlu untuk dilihat kembali upaya pihak-pihak

⁵ Kerinci Time, *Seorang warga babak belur lantaran rebutan lahan parkir di Danau Sipin*, <https://kerincitime.co.id/seorang-warga-babak-belur-lantaran-rebutan-lahan-parkir-di-danau-sipin.html>, 2020, [diakses 29 November 2020]

terlibat untuk mengatasi konflik yang terjadi pada objek wisata Danau Sipin melalui proses kolaborasi.

Pengkoordinasian Danau Sipin menjadi destinasi wisata di Kota Jambi melibatkan berbagai pihak. Diantaranya Dinas Pariwisata Kota Jambi sebagai pengelola wisata Danau Sipin di Kecamatan Danau Sipin, Dinas Pariwisata Provinsi Jambi sebagai pengelola objek wisata Danau Sipin di Kecamatan Telanaipura, dan Pemerintah Kota Jambi membangun sarana fisik danau yaitu *jogging track*, Anjungan, Jembatan, *Drainase*, Lokasi Parkir, Jalan, Toilet, dan Taman Tematik (*skateboard dan Climbing*).⁶

Selain pihak pemerintah, pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin melibatkan masyarakat melalui organisasi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Adanya POKDARWIS dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan pada Pasal 28 mengenai kewenangan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat.

Kelompok Sadar Wisata, selanjutnya disebut dengan POKDARWIS adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan serta memiliki kepedulian dan tanggung jawab dengan berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan. Selain itu terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah

⁶Dinas komunikasi dan informatika kota jambi, *Danau sipin konsep wisata ekologis danau alami di Kota Jambi*, <https://jambikota.go.id/new/2019/02/27/danau-sipin-konsep-wisata-ekologis-danau-alami-di-kota-jambi/>, 2018, [diakses: 29 November 2020]

melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.⁷

POKDARWIS yang terlibat dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin salah satunya yaitu POKDARWIS Pulau Kembang . POKDARWIS ini membawahi berbagai kegiatan wisata yang ada di objek wisata Danau Sipin. Kegiatan wisata tersebut seperti, wisata air berupa perahu ketek dan perahu motor, wahana air serta kuliner. Semua kegiatan wisata tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar objek wisata Danau Sipin sebagai anggota dan pengurus dari POKDARWIS Pulau Kembang.

Pada dasarnya pengelolaan pariwisata menekankan pada prinsip-prinsip yang berorientasi pada kelestarian lingkungan alam, komunikasi dan nilai-nilai sosial. Pada pengelolaan objek wisata Danau Sipin lebih menekankan pada fungsi pengkoordinasiannya. Fungsi pengkoordinasian dianggap sebagai salah satu fungsi dari pengelolaan yang lebih tepat untuk menggambarkan upaya mengumpulkan dan mengkoordinasi sumber daya manusia, keuangan serta barang fisik dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan dari objek wisata Danau Sipin.

Konsep yang sejalan dengan fungsi pengkoordinasian dari objek wisata Danau Sipin yaitu kolaborasi. Konsep ini melibatkan banyak pihak dalam sebuah tata kelola. Konsep kolaborasi berasal dari Teori *Collaborative Governance*. Teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh *Ansell and Gash* (2007) yaitu menjelaskan pelaksanaan model tata kelola kolaboratif dengan berbagai variabel

⁷ Rahim, Firmansyah, *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*, https://www.kemendikbud.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_all/1_%20Pedoman%20Pokdarwis.pdf , 2012, [diakses : 3 November 2021]

di dalamnya mulai dari tahapan kondisi awal hingga proses kolaborasi terjadi atau sedang berjalan⁸.

Menurut La Ode Syaiful *Collaborative Governance* merupakan model keseimbangan dari kekuatan dan sumber daya antara pemerintah, para pemangku kepentingan, dan lembaga publik lainnya dengan komitmen pemberdayaan bagi pemangku kepentingan yang lebih lemah sehingga mereka saling bergantung satu sama lain dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi berorientasi pada konsensus.⁹

Pada proses kolaborasi yang berlangsung dalam pengkoordinasian wisata Danau Sipin, terbagi menjadi dua yaitu dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pariwisata Kota Jambi selaku pengelola wisata dan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pariwisata Provinsi Jambi. Hal ini membuat beberapa pengembangan atau program pengelolaan yang terhambat karena menimbulkan tumpang tindih akibat dari adanya perbedaan pengelolaan tersebut. Adanya permasalahan yang terjadi di objek wisata Danau Sipin, baik dalam proses pengelolaan, pengkoordinasian hingga kolaborasi, memerlukan analisis lebih lanjut guna menguraikan dan menjelaskan sejumlah masalah yang terjadi pada objek wisata Danau Sipin.

Analisis merupakan kegiatan untuk memilah, mengurai serta membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.¹⁰ Kegiatan analisis termasuk hal

⁸ Ansell, Criss & Alison Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*. University of California, Berkeley, Journal of Public Administration Research and Theory, 18:543–571, 2007, hlm 546

⁹ H, La Ode Syaiful Islamy, *Collaborative Governance konsep dan aplikasi*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2018), Hlm 4

¹⁰ Ramadhani. *Analisis Komunikasi Organisasi di UPT*. Perpustakaan UIN AR-Raniry. Skripsi Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Ranir, 2020.

penting untuk melihat secara detail suatu masalah ataupun peristiwa agar dapat disimpulkan dan diberikan solusi.

Untuk mengkaji sudut pandang masalah pengelolaan pariwisata yang berbeda, perlu dilihat pada penelitian terdahulu. Dimana terdapat beberapa penelitian membahas mengenai pengelolaan pariwisata namun dari penelitian yang dilakukan memiliki sudut pandang dan ciri khas masing-masing dalam fokus penelitiannya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ferry Setiawan dalam judul kolaborasi yang dilaksanakan di kawasan wisata Dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya memiliki fokus penelitian yaitu pada proses kolaborasi yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat¹¹. Proses kolaborasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi pemerintah kota untuk mengembangkan konsep tripartit dalam pengembangan wisata di Kota Palangka Raya.

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu menggunakan konsep kolaborasi serta tempat penelitian pada kawasan wisata. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian sebelumnya menggunakan konsep pengembangan wisata . Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan konsep pengkoordinasian.

Kedua, penelitian yang dilakukan Fandy Kurniawan dengan judul Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta wisata Kabupaten Jombang) . Fokus dalam penelitian ini pada hubungan jaringan atau kerjasama yang dibangun antara pihak swasta dan pemerintah dengan berbasis pada kemitraan bersama. Hasil dari penelitian ini yaitu kemitraan pengelolaan sektor pariwisata mengenai pemanfaatan lahan Tirta Wisata masih hanya terbatas pada kegiatan yang bersifat promosi oleh pihak swasta¹².

¹¹Setiawan Ferry, Ahmad Saefulloh, *Kolaborasi yang dilaksanakan di kawasan wisata dermaga kereng Bangkirai Kota Palangka Raya*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol 10 No 2, 2019 .

¹²Kurniawan, fandy, Soesilo Zauhar, Hermawan, *Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No 1, hlm 47.

Penelitian yang dilakukan diatas terdapat persamaan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga sama mengenai pengelolaan sektor wisata. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu keterlibatan pihak pemerintah dan swasta dalam pengelolaan wisata dengan menggunakan sistem kemitraan bersama. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti keterlibatan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat menggunakan sistem kolaborasi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yudi Kristian dalam judul *Pengelolaan objek wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat di Danau Aco Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung*. Dalam penelitian ini, berfokus pada proses dari tahap-tahap pengelolaan wisata secara umum berdasarkan pada indikator pengelolaan pariwisata serta faktor penghambat dalam pengelolaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata pada Objek Wisata Danau Aco di Kampung Linggang Melapeh cukup memuaskan masyarakat. Hal ini dilihat dari indikator pengelolaan objek wisata yaitu dari segi Atraksi, Aksesibilitas dan fasilitas.¹³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu membahas pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu pengelolaan wisata yang dilakukan hanya berfokus pada keterlibatan satu pihak saja dan lebih membahas indikator dalam objek wisata. Sedangkan pada penelitian saat ini berfokus pada koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan objek wisata.

¹³ Kristian, Yudi, *Pengelolaan Objek wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat di Danau Aco Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung*, Vol 5 No 1, 2017, hlm 5404.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Collaborative Governance* dalam Pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan aspek latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi ?
- b. Apa saja faktor Penghambat proses *Collaborative Governance* dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat proses *Collaborative Governance* dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial dan pemerintahan serta menambah pengetahuan di

bidang ilmu pemerintahan khususnya mengenai Penerapan prinsip proses *Collaborative Governance* dalam pengkoordinasian objek wisata.

- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat dijadikan sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca terutama mengenai Penerapan prinsip proses *Collaborative Governance* dalam pengkoordinasian Objek Wisata.

1.5 Landasan Teori

a. Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *Auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan.¹⁴ Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pembagian Urusan Kewenangan Pusat dan Daerah

Pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal pembagian urusan dan pengelolaan sumber daya alam diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 9 salah satunya yaitu urusan Konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

¹⁴ Endah Kiki, *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Modern dan demokratis. Vol 2 No 2. , 2016, Hlm 799.

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

c. Kewenangan Bidang Pariwisata

Kewenangan pada bidang Pariwisata di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bagian ketiga tentang Urusan Pemerintahan Konkuren pada Pasal 12 sebagai bagian dari Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun Pembagian Urusan antara Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota sebagai Berikut:

1) Pemerintah Daerah Provinsi

- a). Pengelolaan daya tarik wisata, Kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- b) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.
- c). Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.
- d). Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, destinasi pariwisata, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten/Kota.
- b) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

- c) Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
- d) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

1.5.2 Teori Kolaborasi

a. Collaborative Governance

Menurut *Ansell and Gash*, Definisi *Collaborative Governance* adalah sistem yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik atau pemerintahan secara langsung melibatkan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi pada hasil keputusan bersama dan musyawarah serta bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik dengan mengelola program dan aset publik.

*A Governing Arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.*¹⁵

Dalam sistem ini tidak lagi terpisah hubungan yang bersifat top-down atau bottom-up antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Semuanya berada pada satu forum yang sama dengan memiliki perannya masing-masing. Dibutuhkan kerja sama dan koordinasi dalam mencapai sebuah keputusan dengan hasil keputusan bersama.

¹⁵Ansell, Criss & Alison Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*. University of California, Berkeley, Journal of Public Administration Research and Theory, 18:543–571, 2007, hlm 544

Secara umum *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholder* terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi untuk mencapai tujuan bersama¹⁶. Kolaboratif yang dimaksud yaitu melibatkan berbagai *stakeholder* dengan dasar membawa kepentingan masing-masing namun dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama.

Secara khusus, *Collaborative Governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi sukarela dan hubungan yang sejajar antara partisipan multi sektoral. Hal ini disebabkan tuntutan dari *klien* sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait serta terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif untuk memenuhi permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi dan batas sektoral.¹⁷

Konsep ini lebih menekankan pada sebuah kolaborasi yang dibangun dengan sukarela untuk berada di dalamnya, namun realitanya kolaborasi terbentuk dengan tujuan untuk saling melengkapi dalam mengelola sektor publik.

b. Proses *Collaborative Governance* Menurut Anshell and Gash

Model proses tata kelola kolaboratif terkadang mendeskripsikan kolaborasi sebagai pengembangan secara bertahap. Proses kolaborasi sendiri dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :

1) Dialog tatap muka

Semua tata kelola kolaboratif dibangun atas dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan. Sebagai sebuah proses yang berorientasi pada konsensus, dialog tatap muka adalah sangat penting tetapi tidak cukup untuk kolaborasi.

¹⁶Febrian Ade Anggi, *Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan*. Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Vol 11 No 1, 2016, hlm 202

¹⁷Dewi, Trisuma Ratna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil*, Tesis, Program Magister Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret, 2012, Hlm 70

Dialog tatap muka lebih dari sekedar media negosiasi. Ini adalah inti dari proses memecahkan stereotip dan hambatan komunikasi lain yang mencegah eksplorasi keuntungan bersama.

2) Membangun Kepercayaan

Kurangnya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan adalah titik awal yang umum bagi pemerintah kolaboratif. Proses kolaboratif tidak hanya sekedar negosiasi tetapi juga membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Membangun kepercayaan sering kali menjadi hal yang menonjol dari proses kolaboratif awal dan bisa sangat sulit untuk dikembangkan.

3) Komitmen untuk proses

Tingkat komitmen pemangku kepentingan untuk kolaborasi merupakan variabel penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan. Komitmen tentunya sangat erat kaitannya dengan motivasi asli untuk berpartisipasi dalam pemerintahan kolaboratif. Komitmen proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa tawar-menawar dengan niat baik untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai kebijakan yang diinginkan.

4) Pemahaman terhadap keputusan bersama

Dalam proses kolaborasi, pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang hal-hal yang dapat mereka capai bersama. Pemahaman bersama berarti juga seperti tujuan bersama, berbagi visi, arah yang jelas dan strategis. Pemahaman bersama juga dapat menyatakan persetujuan tentang sebuah definisi dari masalah atau mengenai kesepakatan solusi yang relevan untuk menangani sebuah masalah.

5) Hasil Sementara

Kolaborasi lebih mungkin terjadi ketika kemungkinan tujuan dan keuntungan dari kolaborasi relatif konkret dan kecil. Meskipun hasil sementara dapat mewakili hasil yang nyata, namun bagi pemangku kepentingan tidak dapat mengantisipasi kemenangan kecil dalam sebuah proses kolaborasi. Kemenangan kecil mungkin bukan strategi tepat untuk membangun kepercayaan di mana pemangku kepentingan memiliki tujuan lebih ambisius yang tidak dapat dengan mudah diuraikan menjadi hasil. Dengan situasi ini, kepercayaan dapat dibangun dengan eksploitasi bersama sejak dini.¹⁸

c. Faktor Penghambat Kolaborasi

Berjalannya *Collaborative Governance* tentu terdapat faktor-faktor yang bisa menghambat jalannya kolaborasi. Faktor penghambat bisa muncul dari aktor yang terlibat, atau seperangkat aturan yang telah disepakati, dan juga karena unsur politis yang mempengaruhi terhambatnya program dalam *Collaborative Governance*. Faktor-faktor yang dapat menghambat *Collaborative Governance* terutama faktor kepentingan pemerintah atau aktor yang mendominasi struktur, sosial, kultural, maupun politis. Menurut Sudarmo bahwa terhambatnya suatu *Collaborative Governance* dapat disebabkan oleh banyak faktor, terutama Faktor Struktur Sosial, Faktor Kultural, Faktor Kepentingan Pemerintah.

1). Faktor Struktur Sosial

Terkait dengan Faktor struktur sosial, kolaborasi bisa gagal disebabkan karena adanya kecenderungan institusi-institusi yang terlibat dalam kerjasama atau

¹⁸ Ansell, Criss & Alison Gash. *Op.Cit.* hlm 550-561

kolaborasi (terutama dari pihak pemerintah) cenderung menerapkan struktur sosial terhadap pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.

2). Faktor Kultural

Terkait faktor kultural atau budaya, dapat dilihat bahwa kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan budaya ketergantungan pada produsen dan tidak berani mengambil terobosan dan resiko. Terciptanya kolaborasi yang efektif maka bagi aparat pemerintah untuk memiliki skills (keterampilan) agar menciptakan inovasi dan berfokus pada hasil.

3). Faktor Kepentingan Pemerintah

Terkait Faktor Kepentingan Pemerintah, erat kaitannya dengan faktor politik kepentingan diantara masing-masing pemangku kepentingan. Kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Selain itu, perbedaan kepentingan antar pemangku yang terlibat juga dapat menimbulkan kegagalan. Perubahan kesepakatan yang telah disetujui di awal kesepakatan kerjasama akibat adanya kepentingan baru yang berbeda-beda dari pihak terlibat dapat menghambat proses kolaborasi tersebut.

1.5.3. Teori Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Secara *etimologi*, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno yakni “*Management*” yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan

organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

b. Fungsi Pengkoordinasian

Koordinasi atau Pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Pengkoordinasian diartikan sebagai proses yang melibatkan pemindahan informasi antara pekerjaan dan individu untuk menghindari tumpang tindih, menjamin usaha dan sumber penghasilan serta keseimbangan keseluruhan organisasi.¹⁹

1). Prinsip Koordinasi

Dalam pelaksanaan proyek perubahan tentu membutuhkan koordinasi, prinsip koordinasi ini yang menjadi acuan atau dasar dalam melaksanakan koordinasi. Penerapan prinsip koordinasi secara tepat dapat mendukung terwujudnya proyek perubahan. Menurut Hasibuan terdapat beberapa prinsip koordinasi antara lain :²⁰

a) Komunikasi

Komunikasi yang terjalin dalam rangka koordinasi harus menciptakan hubungan yang produktif. Komunikasi dilakukan secara formal dan informal, komunikasi organisasi dan individu, komunikasi eksternal dan internal. Hubungan yang produktif menghasilkan komunikasi yang efektif akan sangat membantu keberhasilan proyek perubahan. Komunikasi dalam prosesnya terbagi menjadi dua bentuk yaitu komunikasi aktif dan komunikasi pasif.

b) Integrasi

Integrasi merupakan suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan atau sebuah sistem yang mengalami pembauran sehingga menjadi satu

¹⁹ Gesi Burhanuddin, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya, *Manajemen dan Eksekutif*, Jurnal Manajemen, Vol 3 No 2, 2019, hlm 53

²⁰ Sukarno, Frenly, *Koordinasi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Nasional Kayan Mentarang di Desa Tanjung Lapang Kilometer Delapan Kabupaten Malinau*, Jurnal Pemerintahan Integratif, Vol 4 No 2, 2016.

kesatuan dari berbagai badan, instansi, atau unit. Adanya integrasi, koordinasi dapat berjalan secara terarah di semua level.

c) Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan, tindakan, dan unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Keserasian dalam pelaksanaan tugas mampu mempermudah penerapan koordinasi dalam suatu organisasi.

d) Simplifikasi

Simplifikasi dimaksudkan bahwa perumusan dari organisasi yang ada harus mampu dijabarkan secara sederhana, mudah dipahami oleh masing-masing unit organisasi. Masing-masing unit organisasi akan mengkoordinasikan tentang tugas dan pelaksanaannya kepada bagian-bagian yang ada.

1.5.4. Teori Pengelolaan Pariwisata

a. Pengertian

Pengelolaan memiliki beberapa pemahaman yaitu proses mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai suatu proses penyusunan dan pengambilan keputusan secara rasional tentang pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung didalamnya secara berkelanjutan.

Menurut Hayyun, Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan dan pencapaian tujuan. Peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata, seperti melakukan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan.²¹

b. Indikator Pengelolaan Wisata

²¹ Meizannur, *Analisis Pengembangan Obyek Wisata Alam di Resort Balik Bukit Pekon Kubu Perahu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, Skripsi Jurusan Pertanian Universitas Lampung, 2014

Menurut Oka A. Yoeti bahwa berhasil nya sebuah tempat wisata didasarkan pada beberapa indikator pengelolaan wisata yaitu :²²

1) Atraksi Wisata (*Attraction*)

Merupakan sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu untuk dapat dilihat, serta dinikmati dalam hal ini seperti tari-tarian, nyanyian tradisional serta upacara adat. Atraksi wisata dapat dijadikan sebagai sebuah daya tarik bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata yang lebih menarik dan atraktif.

2) Aksesibilitas (*accessibility*)

Dalam sebuah aktivitas kepariwisataan, transportasi dan komunikasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keinginan wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Aksesibilitas dalam wisata diperlukan untuk mempertimbangkan waktu dan jarak yang efisien untuk melakukan kegiatan wisata. Selain itu aksesibilitas juga berhubungan dengan prasarana jalan, jembatan, terminal, stasiun dan bandara. Prasarana ini berfungsi untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dalam pengelolaan wisata.

3) Fasilitas (*amenities*)

Fasilitas dari pariwisata tidak terpisah dengan akomodasi perhotelan. Karena pariwisata tidak akan pernah berkembang tanpa penginapan. Fasilitas wisata merupakan hal-hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu daerah tujuan wisata.

c. Prinsip Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata juga dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :²³

- 1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *Special Local Sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.

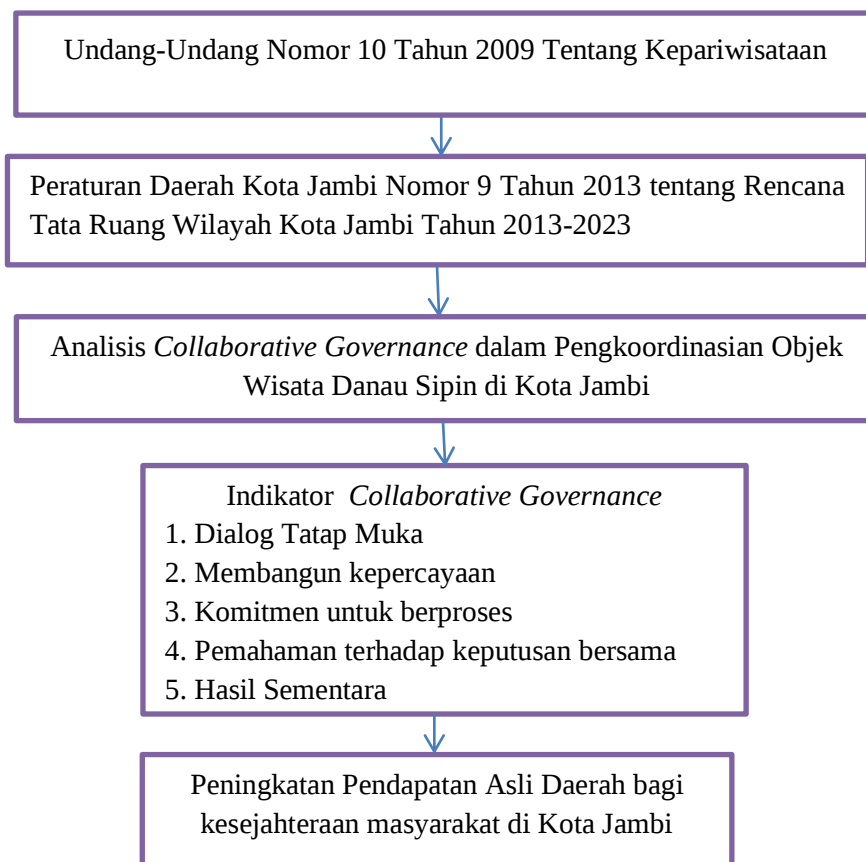
²² Kristian Yudi , *Loc.Cit*, hlm 5408.

²³ Rudy Gde Dewa, I Dewa Ayu Dwi Mayasari, *Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalm Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*. Jurnal Kerta Wicaksana, Vol 13 No 2, 2019 , hlm 73

- 2) *Preservasi*, perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- 3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- 4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.

1.6 Kerangka Berpikir

Adapun bagan dari kerangka berpikir mengenai Penerapan *Collaborative Governance* dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi adalah sebagai berikut:



1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁴

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif. Dengan penelitian deskriptif ini, peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan fakta sebenarnya yang ada di lapangan terkait peristiwa atau fenomena yang diteliti.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Letak lokasi penelitian yaitu terdapat pada objek wisata Danau Sipin yang bertempat di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Dimana tempatnya yang strategis berada di tengah Kota Jambi serta dekat dengan berbagai fasilitas besar seperti rumah sakit dan kompleks perkantoran pemerintahan. Serta Dinas Pariwisata Kota Jambi selaku pengelola dalam bidang Pariwisata di Kota Jambi.

²⁴ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225

1.7.3 Fokus Penelitian

Untuk menentukan fokus penelitian, penulis memfokuskan pada segi proses kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Jambi, Dinas Pariwisata Provinsi Jambi, Café Hello Sapa serta masyarakat pengelola objek wisata Danau Sipin salah satunya yaitu Kelompok Sadar Wisata Pulau Kembang. Sesuai dengan Teori *Collaborative Governance* dalam penerapannya berfokus pada 5 (lima) indikator yaitu Dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen untuk berproses, pemahaman terhadap keputusan bersama, hasil sementara.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, maupun penyebaran angket. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian dan melalui hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sendiri.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber berupa artikel ilmiah, arsip, laporan, buku, dan sumber pendukung relevan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan media internet sebagai sumber literatur dalam bentuk seperti jurnal, artikel, buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Untuk menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menentukan orang yang berpotensi dalam memberikan informasi mengenai bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi yaitu :

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Informan	Nama
1.	Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Fatimah, S.E
2.	Kepala Bidang Daya Tarik Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi	Nanang Sunarya, S.Pd., M.Pd
3.	Sekretaris Kelurahan Sungai Putri	Muntama
4.	Kelompok Sadar Wisata Pulau Kembang	John Herman
5.	Masyarakat Danau Sipin	Pendi

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu merupakan sebuah metode yang menitikberatkan pada pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk melihat dan mengetahui secara

pasti mengenai Proses *Collaborative Governance* dalam Pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan yang berisi tanya jawab secara lisan antara 2 orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Selain itu dengan menggunakan metode ini, dapat meyakinkan para pembaca akan kebenaran dari sebuah penelitian karena pembaca juga ikut serta melihat melalui gambar yang dicantumkan.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan proses analisis data yaitu dilakukan secara terus menerus melalui proses yang telah dilalui sejak menelaah dari berbagai sumber atau studi literatur kemudian melakukan pengamatan (observasi) untuk mendapatkan data hingga wawancara dan dapat menarik kesimpulan. Kemudian untuk menganalisis data terdapat berbagai cara yaitu :

- a. Reduksi data yaitu dengan memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Display data yaitu menyajikan data yang telah dipilih dalam bentuk konseptual, matriks dan grafik.

- c. Pengambilan keputusan melalui data yang diperoleh, dianalisis dan diseleksi sehingga menghasilkan kesimpulan.

1.7.8 Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan kombinasi berbagai sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau gejala sosial. Sementara teknik triangulasi dalam penelitian ini yaitu triangulasi data yang merupakan penggunaan berbagai sumber data dari suatu penelitian.

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dilantik berdasarkan Peraturan Walikota No. 52 Tahun 2016 dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Kepala yang membawahi 1(satu) sekretaris, 4 (empat) kepala bidang dan masing-masing kepala bidang memiliki 3 (tiga) kepala seksi, sekretaris memiliki 3 (tiga) kepala sub bagian. Sehingga total kasubbag/kasi menjadi 15 (lima belas) jabatan.

2.1.1 Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

Visi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi yaitu “ Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Tujuan Wisata Yang Bersaing Dan Berkelanjutan Menuju Kota Jambi Terkini 2018” . Visi ini mengandung makna bahwa Kota Jambi sebagai tujuan wisata adalah menjadikan Kota Jambi, sebagai tempat yang memiliki berbagai daya tarik wisata untuk dikunjungi serta mampu bersaing dan berkelanjutan.

2.1.2 Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

Untuk mewujudkan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi maka telah ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Kebijakan teknis Bidang Kebudayaan dan Pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal.
- b. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata

- c. Meningkatkan Pelayanan Kebudayaan dan Pariwisata yang Profesional
- d. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- e. Meningkatkan Koordinasi dan Hubungan kerjasama dengan pihak lain.

2.1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

a. Tugas Pokok

Tugas pokok dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang *“Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah”* adalah membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

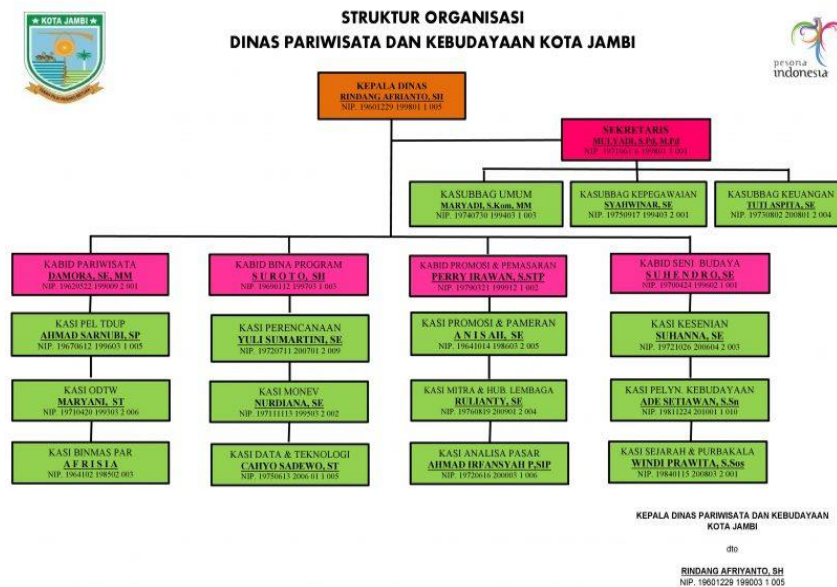
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata dan Kebudayaan
- 3) Perencanaan, pembangunan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 4) Pengkoordinasian dan hubungan kerjasama dengan pihak lain

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, terdiri dari :

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

1). Sekretariat

Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi meliputi: urusan umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas serta melaksanakan tugas-

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh 3 orang Kasubbag, yaitu : Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan, dan Kasubbag Kepegawaian.

2). Bidang Bina Program

Bidang Bina Program berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Bina Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang penyusunan program, pengelolaan data, pengembangan sistem dan teknologi informasi, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta penyusunan laporan kinerja Dinas. Bidang Bina Program terdiri dari : Seksi Perencanaan, Seksi Data dan Teknologi Informasi, Seksi Monitoring dan Evaluasi

3). Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Pariwisata memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang sarana dan prasarana pariwisata, Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, promosi, pengendalian dan pengawasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pariwisata terdiri dari : Seksi Bimbingan Masyarakat dan Industri Pariwisata, Seksi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata, Seksi Pelayanan TDUP, Pengendalian dan Pengawasan Pariwisata.

4). Bidang Kebudayaan dan Kesenian

Bidang Kebudayaan dan Kesenian berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang

Kebudayaan dan Kesenian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan dan nilai budaya, pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya. Bidang Kebudayaan dan Kesenian terdiri dari : Seksi Seni Budaya dan Hiburan, Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan, Seksi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

5). Bidang Promosi dan Pemasaran

Bidang Promosi dan Pemasaran berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Promosi Pemasaran memiliki tugas membantu Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya dibidang pemasaran pariwisata serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Promosi dan Pemasaran terdiri dari : Seksi Promosi dan Pameran, Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata dan Seni Budaya, Seksi Kemitraan dan hubungan antar lembaga.

a) Fungsi Bidang Promosi dan Pemasaran

Berkaitan dengan penelitian ini, Bidang Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar daerah tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
- (2) Pelaksanaan penelitian kepariwisataan
- (3) Pelaksanaan pameran dan promosi seni budaya dan pariwisata
- (4) Penyediaan bahan-bahan promosi seni budaya dan pariwisata
- (5) Pelaksanaan penyebarluasan promosi seni budaya dan pariwisata

- (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

b) Seksi Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga

Berkaitan dengan penelitian ini, Seksi Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga
- (2) Membantu, memberikan fasilitas dan prioritas dalam menyelenggarakan promosi atau melakukan kegiatan kepada usaha Pariwisata dan Seni Budaya
- (3) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dibidang pariwisata dan seni budaya
- (4) Melakukan pemberian bantuan sarana dan prasarana pariwisata dan Seni Budaya
- (5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Kelompok Sadar Wisata Pulau Kembang

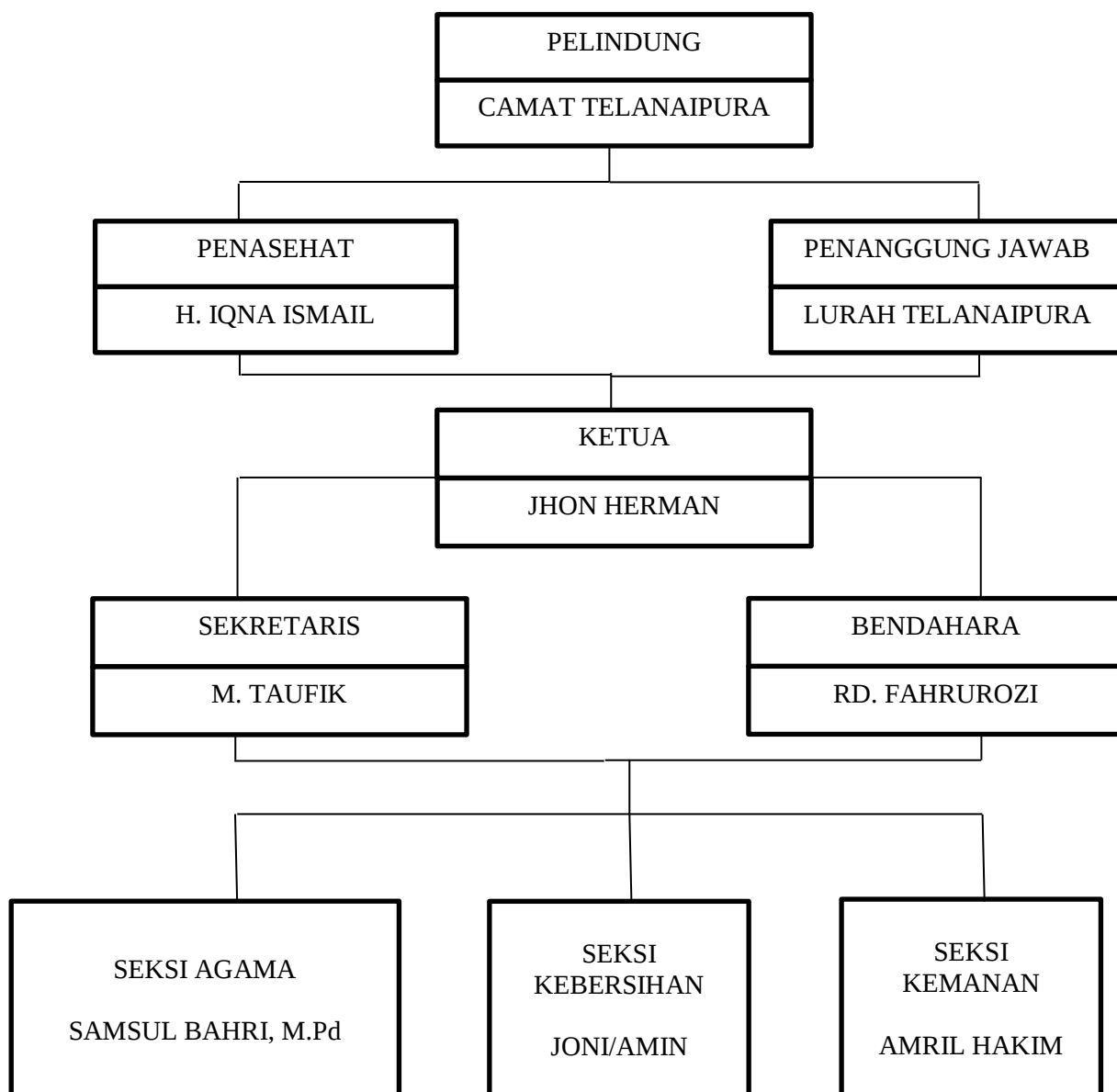
Kelompok Sadar Wisata Pulau Kembang merupakan komunitas masyarakat yang tinggal di sekitar Danau sipin dan dilibatkan dalam pengelolaan objek wisata Danau Sipin sebagai penyedia jasa wisata dan kuliner. Komunitas ini terbentuk atas kesadaran masyarakat sekitar danau sipin yang memiliki usaha Perahu dan Ketek wisata serta usaha kuliner. Tujuannya agar terciptanya keserasian, ketertiban usaha masyarakat serta berupaya untuk saling membantu dalam

memajukan objek wisata Danau Sipin. Berdirinya Kelompok Sadar Wisata Pulau Kembang pada tanggal 02 Februari 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Camat Telanaipura Kota Jambi No 72 Tahun 2021 tentang Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pulau Kembang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

2.2.1 Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata Pulau Kembang

Gambar 2

Struktur Organisasi POKDARWIS Pulau Kembang



2.3 Lokasi Objek Wisata Danau Sipin

Objek wisata Danau Sipin terletak di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Objek wisata ini berupa pemanfaatan wisata air dan wilayah tepi Danau Sipin sebagai tempat rekreasi. Sumber air Danau Sipin berasal dari Sungai Buluran II dan Sungai Putri. Air Danau Sipin dipengaruhi oleh pasang surut permukaan Sungai Batanghari karena letaknya berbatasan langsung dengan Sungai Batanghari. Penduduk setempat memanfaatkan air danau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci, kakus (MCK), transportasi dan tempat rekreasi. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, objek wisata Danau Sipin menjadi salah satu daya tarik wisata di Kota Jambi. Diharapkan dengan adanya objek wisata Danau Sipin ini, dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Jambi yang memberikan dampak bagi Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

2.3.1 Kecamatan Danau Sipin

Kecamatan Danau Sipin merupakan pemekaran wilayah dari Kecamatan Telanaipura berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin, dan Kecamatan Paal Merah.

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Danau sipin terletak di Tengah Pemerintahan Kota Jambi dengan memiliki luas wilayah yaitu 7,88 Km². Keadaan wilayah Kecamatan Danau Sipin datar dan sedikit berbukit serta dibagian Utara terdapat Danau. Kecamatan Danau sipin terdiri dari 5 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Selamat dengan luas 1,40 Km² atau 18% dari luas kecamatan.
2. Kelurahan sungai Putri dengan luas 1,59 Km² atau 20% dari luas kecamatan.
3. Kelurahan Legok dengan luas 3,41 Km² atau 43% dari luas kecamatan.
4. Kelurahan Murni dengan luas 0,36 Km² atau 5% dari luas kecamatan.
5. Kelurahan Solok Sipin dengan luas 1,12 Km² atau 14% dari luas kecamatan.

b. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Danau Sipin yaitu 43.375 jiwa terdiri dari Laki-laki 21.849 jiwa dan Perempuan 21.526 jiwa dengan kepadatan penduduk 5.504 Km². Jumlah Rukun Tetangga di Kecamatan Danau Sipin yaitu 151 dengan Kepala Keluarga berjumlah 11.129 jiwa.

2.3.2 Kelurahan Sungai Putri

a. Kondisi Demografi

Kelurahan Sungai Putri merupakan salah satu kelurahan dari Kecamatan Danau Sipin. Luas wilayah kelurahan Sungai Putri menurut penggunaan tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, tanah fasilitas umum, dan tanah hutan maka total keseluruhan luas adalah 1,59 Ha. Kelurahan Sungai Putri memiliki 26 Rukun Tetangga dengan jumlah kepala keluarga 2.047, serta jumlah penduduk 8.109 jiwa terdiri dari Laki-laki 4.115 jiwa dan Perempuan 3.994 jiwa.

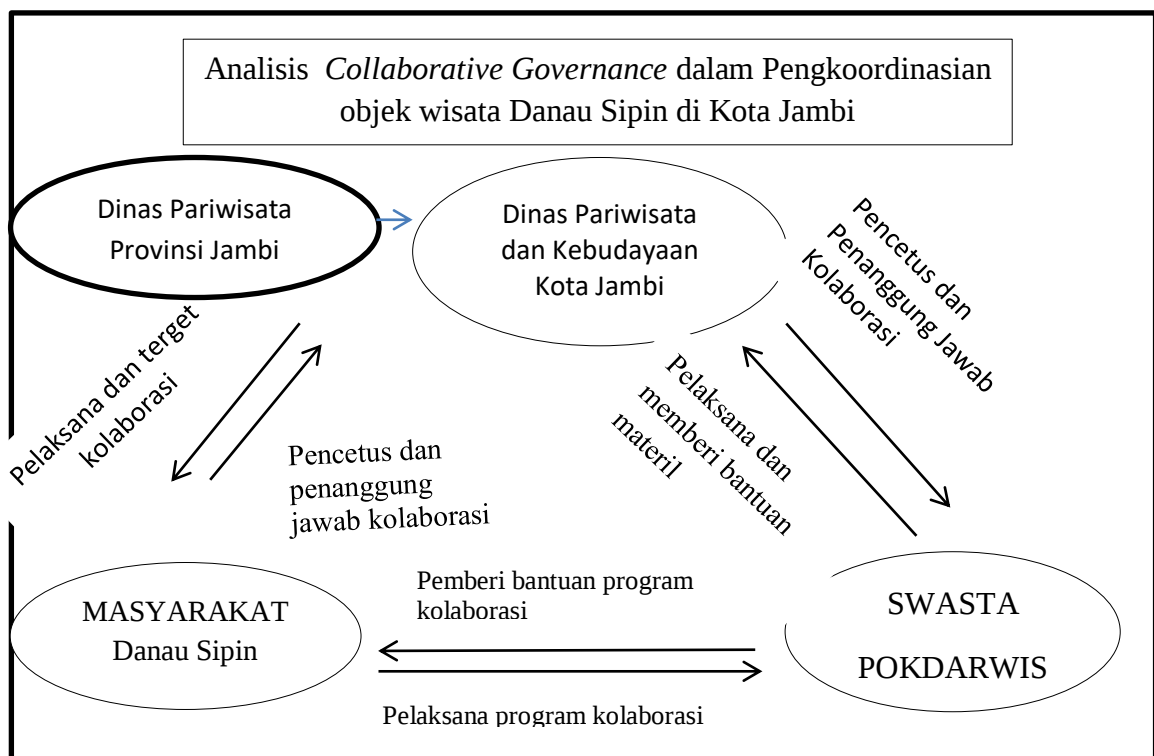
BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses *Collaborative Governance* dalam Pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi

Pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi melibatkan banyak pihak dari berbagai bidang, dimana masing-masing pihak mempunyai peran dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian ini membahas mengenai analisis koordinasi dari kolaborasi yang dilakukan oleh tiga pihak yaitu, Dinas Pariwisata Provinsi Jambi, Dinas Pariwisata Kota Jambi, Kelompok Sadar Wisata Pulau Kembang dan Masyarakat Sekitar Danau Sipin.

Berikut uraian mengenai peranan dari masing-masing pihak terlibat:



Mengingat pentingnya sektor pariwisata, pengelolaan dan koordinasi dari

Pengelolaan objek wisata harus dilakukan secara maksimal agar benar-benar dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengelolaan dan koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah dan kota, swasta serta masyarakat.

Pengelolaan kepariwisataan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pihak swasta (pelaku usaha pariwisata) dan masyarakat yang diharapkan ikut berpartisipasi. Yang dimaksud mengelola menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan.²⁵

Collaborative Governance merupakan sebagai serangkaian peraturan dimana satu lembaga publik atau lebih yang melibatkan secara langsung *Stakeholders non-state* didalam proses pembuatan kebijakan bersifat formal, berorientasi pada kesepakatan bersama dan melalui badan musyawarah yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset. Pencapaian kolaborasi yang baik tentu harus sesuai dengan prinsip proses *collaborative governance*.

Untuk mencapai suatu proses konsensus, dialog langsung diperlukan bagi pihak yang terlibat untuk mengidentifikasi peluang keuntungan bersama. Model kolaborasi penting dalam menarik perhatian sebagai bentuk perubahan. Kolaborasi tergantung pencapaian dari siklus positif antara komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman karena komunikasi merupakan inti kolaborasi sehingga dimulai dengan *face to face* atau dialog tatap muka.

²⁵ Rudy, Gde Dewa, I Dewa Ayu Dwi Mayasari. Op.cit. Hlm 19

3.1.1 Dialog tatap muka antar pihak yang terlibat dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi

Dialog tatap muka merupakan sarana pertemuan secara langsung dalam satu meja antara pemangku kepentingan dengan masyarakat maupun swasta. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Jambi melakukan tahapan dialog tatap muka dengan instansi dalam lingkup Pemerintahan Kota Jambi. Hal ini dilakukan untuk menyatukan visi dan misi agar sesuai dengan harapan serta cita-cita visi Kota Jambi yaitu menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi juga melakukan pertemuan secara langsung dalam merancang dan menjalankan kegiatan bersama masyarakat serta komunitas.

“iya betul, misalkan ada pola pengembangan untuk pengembangan Danau Sipin yang sekarang misalkan ada rencana untuk pembangunan jembatan dari seberang sini menuju seberang sana, itu kita FGD (*Focuss Discution Group*) dalam bentuk tatap muka, para stakeholder kita kumpulkan bahkan tidak hanya pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat juga kita kumpulkan, dan instansi lainnya untuk pengembangan Danau Sipin.”²⁶

Salah satu bentuk pertemuan yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan instansi terkait yaitu melalui Forum OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi. Forum OPD ini merupakan forum pemangku kepentingan untuk membahas usulan program kegiatan prioritas hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dengan rancangan Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD. Forum OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi membahas salah satu nya usulan

²⁶ Wawancara dengan Bpk. Nanang sebagai Kabid Destinasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, pada 13 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB

pengelolaan dan pengembangan Objek Wisata Danau Sipin. Forum OPD ini dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2021 yang dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi (PUPR), Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi (DISPORA), serta CAMAT Danau Sipin. Berikut adalah bukti pertemuan secara langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi pada Forum OPD.

Gambar 3
Rapat Forum OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi



Sumber : Dokumentasi Dinas Pariwisata Kota Jambi

Hasil dari Forum OPD ini salah satunya membahas masalah siapa yang akan mengelola objek wisata Danau Sipin, karena saat ini untuk pengelolaan dan koordinasi dilakukan melalui instansi pemerintahan terkait sehingga banyak yang terlibat dan tidak terlalu fokus untuk mengelolanya. Pada akhirnya di buat rencana untuk pengelolaan objek wisata Danau Sipin Kota Jambi melalui BUMD Siginjai. BUMD Siginjai nantinya akan mengelola seluruh kegiatan objek wisata Danau Sipin dan instansi Pemerintah yang telah terlibat hanya sebagai legislator pada tahap pembuatan kebijakan saja. Hasil rapa forum OPD Dinas Pariwisata Kota Jambi dijadikan sebagai acuan atau standar dalam rencana kerja untuk kolaborasi pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin kedepannya.

Terkait adanya klaim pengelolaan Danau Sipin yang dilakukan juga oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, maka dalam proses kolaborasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi ikut terlibat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi menjalin proses dialog tatap muka juga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi untuk menentukan bagian-bagian serta perencanaan dalam pembangunan objek wisata Danau Sipin. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi terkait dialog tatap muka yang dilakukan.

“Iya tetap harus ada kita mengadakan rapat koordinasi dengan kota, dia membangun apa dan kita membangun apa, jangan sampe dia membangun hal yang sama, makanya wilayah Danau Sipin ada batasan provinsi ada batasan kota.”²⁷

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa proses dialog tatap muka memang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dengan Dinas Kebudayaan dan Provinsi Jambi. Adanya dua pengelolaan ini membuat objek wisata Danau Sipin menjadi kawasan wisata yang terpisah. Meski terlibat dalam kolaborasi dan menjalankan dialog tatap muka, namun pengelolaan dilakukan secara sendiri-sendiri oleh instansi terkait. Fungsi kolaborasi yang dilakukan hanya untuk memudahkan koordinasi terkait perencanaan pada masa pembangunan objek wisata Danau Sipin. Selain dialog tatap muka yang dilakukan antar instansi pemerintahan, dialog tatap muka juga dilakukan dengan masyarakat

²⁷ Wawancara dengan Ibu Fatimah sebagai Kasi Pengembangan Kawasan Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, pada 18 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB.

sekitar Danau Sipin. Terutama pada upaya pengembangan objek wisata Danau Sipin kedepannya.

“bahkan masyarakat ikut diajak berkolaborasi lewat forum RT disana, kelompok sadar wisata disana, lalu bahkan lembaga adat tentunya kita libatkan kolaborasi.”²⁸

Pada proses ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi melakukan musyawarah dengan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Salah satunya yang sering menjalin komunikasi yaitu POKDARWIS Pulau Kembang. Proses dialog tatap muka ini dilakukan untuk membahas terkait saran dan masukan dari masyarakat mengenai pengelolaan objek wisata Danau Sipin. Kegiatan ini dilakukan dengan diskusi ringan pada tanggal 1 Oktober 2019 di kelurahan legok oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Camat Danau Sipin, Ketua POKDARWIS Pulau Kembang.

Gambar 4
Dialog Tatap Muka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dengan POKDARWIS Pulau Kembang



Sumber : Dokumentasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

²⁸ Wawancara dengan Bpk. Nanang sebagai Kabid Destinasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, pada 13 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB

Hal ini didukung dengan pernyataan dari Ketua POKDARWIS Pulau Kembang bahwa :

“iya kita saling berdialog, kan terakhir kemarin kita sudah menyerahkan sebanyak 32 orang untuk dilatih menjadi guide yang baik, pemandu wisata yang baik, atau macam mana menjadi driver atau pengemudi ketek namun sampai saat ini belum terealisasi.”²⁹

Dialog secara langsung juga dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Jambi dengan masyarakat sekitar Danau Sipin. Salah satunya dengan warga RT 02 Kelurahan Buluran, Kecamatan Telanaipura. Dialog tatap muka ini dilakukan untuk melihat potensi wisata Danau Sipin yang berada di wilayah RT 02 tersebut. kedepannya, potensi wisata tersebut dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang bisa dikelola oleh POKDARWIS serta melibatkan masyarakat dalam sektor usaha dan jasanya.

Gambar 5
Pertemuan Dinas Pariwisata Kota Jambi dengan Masyarakat Danau Sipin RT 02 Kelurahan Buluran



²⁹ Wawancara dengan Bpk. John Herman sebagai Ketua POKDARWIS Pulau Kembang di objek wisata Danau Sipin Kota Jambi, pada 4 November 2021 Pukul 14.00 WIB

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah yaitu Dinas Pariwisata Kota Jambi untuk menentukan tujuan awal kolaborasi bersama masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi wisata yang akan dikembangkan. namun, sangat disayangkan bahwa kegiatan ini hanya dilakukan oleh beberapa perwakilan masyarakat saja, seharusnya pertemuan tersebut melibatkan seluruh warga sehingga lebih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dinas Pariwisata Kota Jambi seharusnya juga bisa membuat pertemuan secara lebih formal dengan masyarakat dan berkelanjutan.

Selain pertemuan Dinas Pariwisata dengan masyarakat serta pokdarwis, pokdarwis juga melakukan pertemuan dengan masyarakat sekitar Danau Sipin. Pertemuan ini sebagai diskusi dengan masyarakat terkait pembangunan Danau Sipin menjadi objek wisata serta upaya pokdarwis untuk mengajak masyarakat juga terlibat dalam pengelolaan Danau Sipin. Pertemuan ini dilakukan di tempat Pokdarwis Pulau Kembang, diikuti oleh perwakilan masyarakat yang tinggal disekitar Danau Sipin.

Gambar 6
Pertemuan POKDARWIS dengan Masyarakat Danau Sipin



Kegiatan ini seharusnya bisa dilakukan rutin dengan masyarakat, serta perlu melibatkan banyak masyarakat lain sehingga dialog tatap muka ini juga sebagai sarana untuk saling bertukar pikiran dan pendapat. Hasil dari kegiatan ini juga seharusnya bisa di laksanakan atau diterapkan tetapi kenyataannya keterlibatan masyarakat juga saat ini masih terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, proses dialog tatap muka pada kolaborasi ini mulai berjalan sesuai proses *Collaborative Governance* yang diungkapkan oleh Anshell and Gash dilihat pada beberapa kriteria yang dijalankan seperti dialog tatap muka dengan POKDARWIS serta masyarakat Danau Sipin. Pada tahap ini, meskipun mulai berjalan tetapi masih perlu dilakukan secara konsisten dan tidak hanya sekali saja. Masyarakat juga berharap kegiatan ini menjadi tempat untuk mendapatkan informasi dan ilmu baru untuk mengembangkan wisata di wilayah mereka.

3.1.2 Membangun kepercayaan antar pihak terlibat dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi

Proses kolaborasi memiliki inti dari sebuah kepercayaan, adanya kepercayaan antar pihak yang terlibat merupakan poin awal dalam kolaborasi. Negosiasi bukan satu satunya pusat kolaborasi tetapi membangun kepercayaan antar pihak. Membangun kepercayaan merupakan suatu fase yang digunakan untuk membentuk proses saling memahami antar pihak terlibat agar terciptanya komitmen untuk menjalankan kolaborasi.

Proses membangun kepercayaan merupakan hal penting dalam sebuah kolaborasi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dalam hal ini sebagai

sektor pemerintah membangun kepercayaan melalui komunikasi secara intens antar lembaga pemerintahan serta masyarakat yang terlibat dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin Kota Jambi.

“kita memang selalu menjadi komitmen pemerintah Kota Jambi, untuk membangun kepercayaan masyarakat terlebih dahulu supaya pemahamannya sama. Maka pada setiap pertemuan-pertemuan daerah dan studi awal dengan kelompok masyarakat dimana mereka juga dimintai pendapat”³⁰

Upaya membangun kepercayaan Dinas Pariwisata Kota Jambi dengan masyarakat yaitu dilakukan dengan memberikan layanan kepada masyarakat melalui Focus Grup Discussion (FGD) tentang Perencanaan Kepariwisata Sarana dan Prasarana Danau Sipin, yang bertempat di Kantor camat Danau Sipin.

Gambar 7

FGD Dinas Pariwisata Kota Jambi dan Masyarakat Danau Sipin



Pada kegiatan ini juga membahas perencanaan sarana dan prasarana kepariwisataan bagi masyarakat Danau Sipin untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kegiatan wisata. Kegiatan ini sudah baik dilakukan sebagai upaya membangun kepercayaan dengan mendukung kebutuhan skill bagi masyarakat

³⁰ Wawancara dengan Bpk. Nanang sebagai Kabid Destinasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, pada 13 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB

Danau Sipin. Diharapkan, upaya membangun kepercayaan bisa dilakukan lagi dalam bentuk kegiatan lain yang juga bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, upaya membangun kepercayaan yang dilakukan POKDARWIS dengan masyarakat yaitu melalui pertemuan-pertemuan untuk membahas tujuan serta dampak positif dan negatif dari pembangunan objek wisata Danau Sipin kepada masyarakat. Pembangunan objek wisata Danau Sipin tentu banyak memiliki dampak bagi masyarakat disekitarnya, baik itu secara negatif atau positif sehingga perlu dilakukan penjelasan dan membangun kepercayaan pada masyarakat .

Upaya membangun kepercayaan menjadi landasan bagi kolaborasi untuk dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kesamaan visi misi yang akan dicapai bersama serta adanya kepercayaan dari masing-masing pihak terlibat dapat membuat kolaborasi berjalan lebih mudah. Menurut Penulis, upaya membangun kepercayaan yang dilakukan oleh POKDARWIS dengan masyarakat Danau Sipin seharusnya bisa terus dilanjutkan, bukan hanya pada awal kolaborasi saja tetapi membangun kepercayaan bisa dilakukan rutin melalui pertemuan dengan membahas evaluasi program yang sudah dijalankan. Upaya membangun kepercayaan ini juga seharusnya dilakukan dengan duduk bersama tidak hanya diwakilkan melalui POKDARWIS saja, sehingga ada terjalin hubungan emosional dari pihak-pihak terlibat.

Gambar 8
Diskusi POKDARWIS dengan Perwakilan Masyarakat Danau Sipin



Upaya membangun kepercayaan juga dilakukan dengan instansi terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi mengingat adanya dua pengelolaan pada objek wisata Danau Sipin. Proses komunikasi dan koordinasi ini dilakukan salah satunya dengan diskusi turun ke lapangan bersama. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021 dalam rangka memantau destinasi wisata pada masa pandemi covid-19 di objek wisata Danau Sipin Kota Jambi.

Gambar 9
Koordinasi Dinas Pariwisata Kota Jambi dan Dinas Pariwisata Provinsi



Pada saat adanya Pandemi Covid-19, sektor pariwisata salah satunya menjadi perhatian khusus untuk mencegah penularan virus, sehingga perlu dilakukan koordinasi antara Dinas Pariwisata kota Jambi dan Dinas Pariwisata Provinsi Jambi mengingat adanya dua pengelolaan dalam objek wisata tersebut.

Dinas Pariwisata Kota Jambi juga terus berupaya membangun kepercayaan dengan pokdarwis sebagai bagian untuk pelaksanaan kolaborasi dilapangan. Wujud upaya membangun kepercayaan tersebut juga di hadirkan dalam kegiatan untuk menambah skill pokdarwis serta penjelasan bagaimana pengelolaan wisata yang baik. Kegiatan ini dilakukan pada sosialisasi tata kelola destinasi wisata menuju kampung wisata, yang bertempat di Hotel luminor pada tanggal 14 September 2021.

Gambar 10
Sosialisasi dari Dinas Pariwisata Kota dengan Pokdarwis



Upaya membangun kepercayaan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Jambi dengan Pokdarwis sudah cukup baik dilakukan. Dukungan dari pemerintah terhadap Pokdarwis sebagai upaya membangun kepercayaan untuk memiliki keyakinan terlibat dalam kolaborasi pengelolaan wisata. keyakinan tersebut juga

harus dibekali dengan pengetahuan serta skill sehingga kegiatan sosialisasi ini juga sebagai bentuk pembekalan bagi Pokdarwis untuk terlibat dalam pengelolaan wisata. Hal ini juga disampaikan oleh ketua Pokdarwis yaitu bapak John herman, bahwa :

“kita memang sering dilibatkan dengan dinas pariwisata kota biasanya kalau ada pelatihan, sosialisasi dan kita juga pasti hadir karena kan itu upaya kita juga untuk dapat ilmu apalagi soal pengelolaan wisata, jadi kita yakin percaya kalau keterlibatan kita sebagai pokdarwis juga punya kontribusi nya untuk danau sipin”.³¹

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa proses membangun kepercayaan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi belum cukup baik. Hal ini karena adanya konflik klaim pengelolaan yang menjadi dua antara Dinas Pariwisata Kota Jambi dan Provinsi Jambi, meskipun kegiatan tersebut berjalan, namun upaya membangun kepercayaannya sulit dilakukan.

3.1.3 Membangun Komitmen pada proses kolaborasi antar pihak yang terlibat dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin Kota Jambi

Membangun komitmen merupakan salah satu langkah penting dalam proses kolaborasi. Komitmen bergantung pada kepercayaan akan masing-masing pihak terlibat untuk mau menghormati perspektif dan kepentingan pihak lain. Adanya komitmen bersama yang diciptakan merupakan bentuk persamaan tujuan untuk mencapai keuntungan bersama.

“Komitmen berhubungan terhadap motivasi yang kuat untuk berpartisipasi pada *Collaborative Governance*. Komitmen terhadap proses memiliki arti memperluas keyakinan jika perundingan yang dijalankan disertai niat baik

³¹ Wawancara dengan bpk. John Herman selaku Ketua Pokdarwis Pulau kembang, Pada 4 November 2021, Pukul 15.00 bertempat wisata danau sipin Pulau Kembang

guna mencapai keuntungan bersama adalah upaya paling baik guna meraih hasil kebijakan yang diharapkan.”³²

Berdasarkan hal tersebut komitmen berarti keinginan dari setiap pihak yang terlibat untuk ikut serta dalam kolaborasi. Komitmen juga keyakinan untuk mencapai keuntungan bersama dalam meraih hasil kebijakan yang di harapkan. Upaya komitmen yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi yaitu melakukan komunikasi dengan pihak terlibat untuk menjabarkan program-program dan tujuan dalam pengembangan objek wisata Danau Sipin.

“bagaimana untuk membangun komitmen itu dari antar instansi, lagi dan lagi bahwa kita mendedahkan dulu latar belakang program yang akan dibangun lalu tujuannya untuk apa setelah itu tahapan-tahapan yang dilakukan juga bagaimana lalu apasih yang menjadi tanggung jawab masing masing. Ketika membangun Danau Sipin bukan miliknya pariwisata itu menjadi miliknya kota, kesamaan pandangan, kesamaan visi, penerjemahan visi induk walikota dan wakil walikota itulah akhir dari penerjemahan kegiatan bersama antar pemerintah dilahirkan menuju ke misi visi nya induk.”³³

Berdasarkan hal tersebut, upaya membangun komitmen yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi melalui antar instansi terlebih dahulu. Adanya kesamaan visi dan misi dalam mencapai tujuan yang menjadikan komitmen untuk melakukan proses kolaborasi. Kesadaran dari antar instansi yang terlibat atas kesamaan tujuan dan pandangan menjadi dasar komitmen untuk ikut serta dalam kolaborasi.

Peran nyata membangun komitmen tersebut dapat dilihat pada terselenggaranya kerja sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

³² Indriani, Ni Kadek dkk., *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Objek Wisata Belanja Pasar Seni Sukawati Kabupaten Gianyar, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, hlm 5 , 2021.

³³ Wawancara dengan Bpk. Nanang sebagai Kabid Destinasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, pada 13 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB

dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dalam kegiatan Gotong Royong pembersihan lokasi wisata Danau Sipin. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh dua instansi terkait saja tapi juga oleh Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 21 Juni 2019 bertempat di kawasan wisata Danau Sipin Kota Jambi dan di pimpin langsung oleh Walikota Jambi yaitu Dr. H. Syarif Fasha, ME.

Gambar 11
Kerja Sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dengan Dinas Pariwisata Kota Jambi dalam Pembersihan lokasi wisata Danau Sipin



Sayangnya, kegiatan membangun komitmen hanya dilakukan diawal proses pembangunan onjek wisata Danau Sipin, sehingga upaya membangun komitmen ini hendaknya dinyatakan dalam bentuk perjanjian atau aksi nyata dari pihak terlibat. Terlebih lagi, karena adanya klaim pengelolaan yang terbagi menjadi dua maka bagi dua pihak terlibat ini akan sulit untuk membuat komitmen kolaborasi karena upaya membangun kepercayaan juga sulit dilakukan.

Upaya membangun komitmen juga dilakukan Dinas Pariwisata Kota Jambi dengan Pokdarwis sebagai salah satu pihak terlibat dalam kolaborasi, pokdarwis memiliki peran penting didalamnya. Keterlibatan pokdarwis yang berfungsi sebagai pelaksana dalam kolaborasi dilapangan bersama masyarakat tentu harus memiliki komitmen untuk ikut serta berpartisipasi aktif. Upaya membangun komitmen tersebut di wujudkan dalam dukungan pemerintah untuk memberikan sertifikat kelayakan kapal dan penempelan stiker ketek wisata Danau Sipin, bertempat di Pokdarwis Pulau Kembang pada 26 Juli 2022.

Gambar 12
Penyerahan sertifikat kelayakan perahu wisata oleh Dinas Pariwisata Kota Jambi dengan Pokdarwis



Kegiatan ini menjadi salah satu keuntungan bagi Pokdarwis karena memiliki kepercayaan untuk beroperasi dalam mengadakan kegiatan wisata. Penyerahan sertifikat menjadi upaya membangun komitmen dari pemerintah kepada pokdarwis agar nantinya Pokdarwis menjadi lebih semangat dan mempunyai

tanggung jawab dalam melakukan kegiatan wisata begitu juga dengan pemerintah sebagai kebijakan untuk lebih memperhatikan lagi pihak-pihak yang terlibat kolaborasi di bawahnya.

Komitmen antara Dinas Pariwisata Kota Jambi dengan Masyarakat Danau Sipin juga seharusnya dilakukan, namun dalam kolaborasi ini proses tersebut belum dilaksanakan. Hal ini karena pengelolaan masih terfokus untuk melibatkan dan melatih pokdarwis serta kerja sama lintas instansi, sehingga upaya membangun komitmen baru dilakukan antara instansi terlibat serta pokdarwis. Hal ini juga disampaikan oleh Kabid Destinasi wisata Dinas Pariwisata Kota Jambi yaitu Bapak Nanang Sunarya, bahwa:

“untuk saat ini, kita baru sampai membangun komitmen dengan instansi dan pokdarwis, sedangkan kalau untuk masyarakat kita baru mengenalkan dan memberikan sosialisasi atau pemahaman saja kalau untuk komitmen belum, mungkin kedepannya nanti kalau pengelolaan danau sipin sudah mulai tertata satu persatu baru diadakan dengan masyarakat”³⁴.

Upaya membangun komitmen ini dari pemerintah kepada masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan nantinya seperti dibuat kesepakatan atau perjanjian antar kelurahan sekitar Danau Sipin, karena kunci jalannya kolaborasi juga ada pada masyarakat sebagai pihak terlibat yang menerima dan juga menjalankan kolaborasi, sehingga pemerintah tidak hanya terfokus hanya pada beberapa pihak terlibat saja.

Selain Dinas Pariwisata Kota Jambi, Pokdarwis juga berupaya membangun komitmen dengan masyarakat. Adanya dampak positif bagi masyarakat karena

³⁴ Wawancara dengan bpk. Nanang Sunarya selaku Kabid destinasi wisata Dinas Pariwisata Kota Jambi, pada 13 Oktober 2021 pukul 10.00 wib

objek wisata Danau Sipin ini juga menjadi komitmen masyarakat untuk berperan aktif dalam koordinasi objek wisata Danau Sipin dengan pokdarwis. Peran aktif tersebut terlihat pada kegiatan gotong royong di kawasan objek wisata Danau Sipin yang dilakukan oleh Masyarakat sekitar.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen masyarakat untuk ikut serta dalam membangun objek wisata Danau Sipin, selain karena dampak positif yang diterima masyarakat sekitar, objek wisata juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat sekitar Danau Sipin karena memiliki fasilitas dan kawasan wisata yang dekat dengan tempat tinggal mereka.

Gambar 13
Gotong royong Pokdarwis dan Masyarakat di Sekitar Danau Sipin



Menurut penulis, upaya membangun komitmen oleh masyarakat sudah cukup baik untuk terlibat, namun kegiatan tersebut juga dapat ditingkatkan dengan komitmen dari masyarakat sekitar untuk menjaga dan merawat kawasan objek wisata Danau Sipin serta terlibat aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di objek wisata Danau Sipin.

Penulis berpendapat bahwa proses komitmen yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi belum cukup baik. Adanya klaim

pengelolaan yang terbagi menjadi dua antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi membuat komitmen menjadi sulit dilakukan karena tidak adanya kepercayaan dari pihak terlibat untuk menyatukan pengelolaan dalam kolaborasi. Selain itu, bentuk komitmen antar instansi juga belum dilakukan seperti kesepakatan, MOU atau dokumen lainnya. Namun, upaya komitmen yang dibangun Pokdarwis dan masyarakat sudah cukup baik karena ikut terlibat aktif dalam membangun objek wisata Danau Sipin.

3.1.4 Proses Saling Memahami antar Pihak Terlibat dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin Kota Jambi

Proses untuk saling memahami dalam kolaborasi harus dikembangkan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Saling memahami antar pihak dalam proses kolaborasi disebut juga sebagai misi bersama, kesamaan niat, tujuan dan arah yang strategis atau keselarasan nilai-nilai sebagai kesepakatan.

“Pemahaman ini di dasari oleh tanggung jawab Dinas Pariwisata dalam mengembangkan dan mendesain memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk layanan pariwisata di Danau Sipin. Komitmen tersebut juga lahir dari dukungan OPD lain atas pemahaman bersama untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Layanan ini bersumber pada penerjemahan dari visi pak walikota”.³⁵

Proses saling memahami yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dalam kolaborasi ini bersumber pada tanggung jawab sebagai instansi pemerintahan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini salah satunya yaitu layanan pariwisata di Danau Sipin. Kesadaran untuk saling memahami antar pihak terlibat dalam proses kolaborasi ini juga sebagai bentuk

³⁵ Wawancara dengan Bpk. Nanang sebagai Kabid Destinasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, pada 13 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB

penerapan visi dan misi Kota Jambi. Selain kesadaran dan tanggung jawab atas kesamaan visi dan misi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi juga tetap menjalin komunikasi secara rutin dengan pihak-pihak terlibat sehingga proses saling memahami tersebut berjalan maksimal. Sikap saling memahami antar pihak terlibat dapat dilihat dari terwujudnya program dan kebijakan untuk pengelolaan dan pembangunan objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi.

Pemberian layanan kepada masyarakat yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sebagai bentuk tanggung jawab atas pemahaman bersama dalam kolaborasi untuk pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin salah satu nya melalui kegiatan pelatihan dengan diikuti POKDARWIS serta masyarakat. Pelatihan tersebut dilaksanakan Pada tanggal 21-23 September 2021 bertempat di Hotel Luminor Kota Jambi, dengan kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Sadar Wisata Bagi Masyarakat Tahun 2021.

Gambar 14
Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Sadar Wisata Bagi Masyarakat dan POKDARWIS Tahun 2021



Pelatihan ini mengangkat tema Membangun Komunitas Sadar Wisata Menuju Satu Kecamatan Satu Destinasi Wisata Unggulan. Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta yang berasal dari seluruh kelurahan di Kota Jambi dengan 75 orang dari unsur masyarakat dan 75 orang dari unsur kelurahan dan Pokdarwis. Pelatihan ini bertujuan sebagai upaya untuk membangun komunitas sadar wisata menuju satu kecamatan satu destinasi wisata unggulan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Kota Jambi, Dr. M. Jaelani, SH., MH. Serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Mariani Yanti, SP., MDM., PH.

Kegiatan ini sebagai kolaborasi antara Dinas Pariwisata Kota Jambi, POKDARWIS serta Masyarakat dalam upaya untuk saling memahami terkait pengelolaan wisata serta bentuk dukungan Pemerintah untuk pengelolaan objek wisata Danau Sipin kepada POKDARWIS dan Masyarakat sehingga kolaborasi dapat berjalan dengan baik.

Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat sekitar objek wisata yang juga memiliki usaha ketek wisata bahwa :

“Kadang kita juga ada ikut pelatihan dari dinas Pariwisata seperti pembentukan POKDARWIS, pembentukan destinasi wisata. contohnya baru-baru ini kita pelatihan di hotel luminor dan ada juga bantuan dari Dinas Perhubungan itu *life jacket* atau pelampung”³⁶.

Proses saling memahami antara Dinas Pariwisata Kota Jambi dengan instansi terkait yaitu dilakukan dalam Rapat Koordinasi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang bertempat di Hotel Luminor pada 16 Februari 2022.

³⁶ Wawancara dengan Bpk. Pendi selaku masyarakat sekitar Danau Sipin yang memiliki Usaha Ketek Hias di Objek Wisata Danau Sipin Kota Jambi, Pada 12 November 2022 Pukul 15.00 WIB

Gambar 15
Rapat Koordinasi Dinas Pariwisata Kota Jambi dengan Dinas Pariwisata
Provinsi



Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Pariwisata kota Jambi dan Dinas Pariwisata Provinsi Jambi serta Pemerintah Provinsi Jambi dalam membahas rencana inovasi pembangunan sektor Kebudayaan dan Pariwisata, salah satunya Danau Sipin. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya saling memahami antar pihak terlibat dalam mendiskusikan apa-apa saja rencana yang diperlukan untuk membangun sektor wisata serta saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing instansi.

Proses saling memahami antara pokdarwis dan masyarakat yaitu dilakukan pada pertemuan-pertemuan dengan membahas kekurangan dan kelebihan atau evaluasi pengelolaan objek wisata Danau Sipin. Kegiatan ini menjadi sarana untuk saling memahami tujuan dari masing-masing serta hal yang akan di capai.

Gambar 16
Pertemuan Pokdarwis dan Masyarakat Danau Sipin



Berdasarkan hal tersebut, Penulis menganalisis bahwa sikap saling memahami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi bersama instansi terkait, POKDARWIS serta Masyarakat sudah cukup baik. namun, sebaiknya dari proses saling memahami ini dapat menghasilkan solusi atas kebutuhan dan mengetahui tujuan dari masing-masing pihak terlibat, serta bisa saling melengkapi kekurangan dan kelebihan pihak yang terlibat.

3.1.5 Hasil Sementara Kolaborasi antar Pihak Terlibat dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi

Hasil sementara merupakan bentuk upaya dari adanya hubungan kolaborasi yang berlangsung. Kemudian hasil yang telah diperoleh tersebut memberi kebermanfaatan serta memiliki nilai strategis. Kolaborasi secara relatif dapat dikatakan terbangun apabila terdapat kemungkinan keberhasilan dari kolaborasi.³⁷

Hasil sementara memperlihatkan bahwa kolaborasi relatif dapat dikatakan konkrit ketika adanya kemungkinan keberhasilan. Hasil sementara terkadang memang tidak sesuai dengan hasil akhir akan tetapi, proses ini dapat dijadikan momentum keberhasilan yang memberikan umpan balik pada kolaborasi serta mendorong motivasi yang positif.

Kolaborasi antar pihak dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi juga memiliki hasil sementara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Jambi sebagai berikut :

“Hasil dari beberapa diskusi panjang dipimpin langsung oleh pak sekda dan bapak wakil walikota termasuk pak walikota, itu akan dikelola oleh

³⁷ Indriani, Ni Kadek dkk. *Op.Cit* . Hlm 3

pihak ketiga namanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siginjai Sakti.”³⁸

Hasil sementara saat ini dari kolaborasi yang dilakukan, pengelolaan objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi akan melibatkan pihak ketiga sebagai pengelola wisata yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siginjai Sakti. Mengingat objek wisata Danau Sipin yang telah banyak dikenal masyarakat dan antusias untuk berwisata, maka perlu dilakukan pengelolaan secara maksimal agar nantinya hasil tersebut dapat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD Siginjai Sakti nantinya akan mengelola berbagai kegiatan serta fasilitas wisata di objek wisata Danau Sipin melalui kerja sama dengan POKDARWIS, UMKM dan masyarakat sekitar Danau Sipin.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu masyarakat Danau Sipin bahwa :

“iya kita ada mendengar juga kalau Danau Sipin ini akan dikelola dengan BUMD, kita berharapnya semoga bisa kerja sama dengan POKDARWIS contohnya seperti bagi hasil atau cara lain agar kita tetap dilibatkan. Kita sangat berharap keterlibatan kita tidak diganti atau dihilangkan.”³⁹

Masyarakat berharap dengan adanya pengelolaan objek wisata Danau Sipin nantinya oleh BUMD Siginjai Sakti, mereka masih dapat melakukan kegiatan usaha wisata terutama bagi pemilik ketek dan perahu wisata karena usaha tersebut

³⁸ Wawancara dengan Bpk. Nanang sebagai Kabid Destinasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, pada 13 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB

³⁹ Wawancara dengan Bpk. Pendi sebagai salah satu Masyarakat sekitar Danau Sipin yang memiliki Usaha Ketek Hias di Objek Wisata Danau Sipin Kota Jambi, Pada 12 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB

telah menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat sekitar Danau Sipin. Selain itu, mereka juga berharap bahwa pengelolaan objek wisata Danau Sipin oleh BUMD Siginjau Sakti nantinya dapat memajukan objek wisata tersebut dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Lahirnya BUMD Siginjau Sakti sebagai salah satu bentuk upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi bersama pihak yang terlibat untuk menjadi solusi terkait pengelolaan objek wisata Danau Sipin agar lebih fokus dan terarah.

Hasil sementara dari kolaborasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi bersama dengan pihak terlibat cukup baik. Namun, dalam menentukan hasil sementara masih dilakukan hanya melalui instansi pemerintah saja, tidak secara langsung melibatkan masyarakat serta pokdarwis dalam membuat keputusan. Diharapkan, dengan adanya hasil sementara untuk pengelolaan Danau Sipin bisa dilaksanakan secepatnya karena saat ini objek wisata Danau Sipin juga sudah mulai ramai peminat sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang maksimal.

Terdapat fakta menarik dari proses kolaborasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi yaitu adanya keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam pengelolaan objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi. Klaim pengelolaan terjadi karena ada aset milik Pemerintah Provinsi disekitar objek wisata Danau Sipin yang dibangun oleh Pemerintah Kota Jambi, sehingga kawasan wisata Danau Sipin juga terbagi menjadi dua yakni milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi. Hal ini

membuat adanya kolaborasi pemerintah dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin Kota Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi belum memenuhi kriteria proses kolaborasi dengan baik sesuai *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash. Hal ini dapat dilihat pada beberapa proses kolaborasi yang tidak berjalan semestinya, seperti pada proses membangun komitmen. Pada proses ini, upaya yang dilakukan masih belum maksimal karena proses yang berjalan belum ada melibatkan masyarakat serta upaya membangun kepercayaan yang sulit dilakukan karena adanya konflik klaim pengelolaan antar instansi terlibat. Namun, pada beberapa proses kolaborasi lainnya sudah mulai berjalan seperti Dialog Tatap Muka, Upaya membangun Kepercayaan, Upaya untuk Saling memahami, serta Hasil Sementara dari kolaborasi yang sudah jelas.

3.2 Faktor Penghambat Hubungan *Collaborative Governance* dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin Di Kota Jambi

Kolaborasi yang telah berjalan juga memiliki faktor penghambat. Salah satunya dalam hubungan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak untuk melakukan koordinasi. Faktor penghambat ini sebagai bentuk tantangan dalam menjalankan proses kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak dari sektor berbeda-beda. Terhambatnya suatu *Collaborative Governance* dapat disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor budaya, institusi dan politik.

Terkait *Collaborative Governance* dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi juga memiliki beberapa faktor penghambat yang

menjadi tantangan hubungan kolaborasi dari berbagai pihak terlibat. faktor penghambatnya dapat dilihat melalui tiga indikator menurut Soedarmo yaitu Faktor Struktur Sosial, Faktor Kultural, dan Faktor Kepentingan Pemerintah⁴⁰.

3.2.1. Faktor Struktur Sosial

Faktor struktur sosial berkaitan dengan bagaimana pola hubungan dari kolaborasi tersebut berjalan. Kolaborasi bisa gagal salah satunya karena ada dominasi dari institusi yang terlibat terutama dari pihak pemerintah cenderung menerapkan pola hubungan bertingkat terhadap pihak terlibat lain. Pada akhirnya, kolaborasi tersebut menjadi kaku dan memiliki batasan dengan kondisi yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu diperhatikan dalam sebuah proses kolaboratif agar bagaimana hubungan antar pihak terlibat dapat bersifat sejajar untuk mengambil keputusan secara bersama.

Faktor penghambat yang terjadi pada *Collaborative Governance* dalam Pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin salah satunya yaitu faktor struktur sosial. Hal ini dapat dilihat dalam hubungan kolaborasi antara Dinas Pariwisata Kota Jambi, Café Hello Sapa dan Kelompok Sadar Wisata atau Masyarakat. Hubungan kolaborasi lebih mendominasi dari peran Pemerintah yang turun langsung dalam mengelola objek wisata tanpa adanya bantuan atau kerja sama dengan swasta secara langsung. Selain itu adanya rencana pengelolaan yang akan dibentuk melalui BUMD Siginjai Sakti oleh Pemerintah sebagai salah satu bentuk dominasi Pemerintah dalam menentukan keputusan bersama. Sehingga pola hubungan kolaborasi bertingkat dimana Pemerintah Kota Jambi yang di

⁴⁰ Arifin Syamsul , Utami dewi. *Collaborative Governance dalam Program Rintisan Desa Inklusif di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 2018. Hlm 327

wakili oleh Dinas Pariwisata Kota Jambi sebagai tingkatan atas penentu kebijakan atau program yang dibuat. Kemudian ada masyarakat sebagai subjek implementasi program untuk pengelolaan objek wisata Danau Sipin melalui Kelompok Sadar Wisata dengan berbagai pelatihan sumber daya manusia dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Selanjutnya, ada pihak swasta yaitu Café Hello Sapa yang memberikan dukungan atau sponsor pada Pemerintah Kota Jambi salah satunya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Danau Sipin kota Jambi. Selain dengan Pemerintah, Café Hello Sapa juga membangun hubungan langsung dengan masyarakat sekitar Danau Sipin dengan mengadakan kegiatan sosial.

Struktur sosial kolaborasi yang berjalan disini belum ada timbal balik dari pemerintah dengan swasta ataupun sebaliknya. Hal tersebut karena posisi pihak swasta tidak terlibat langsung dalam kolaborasi dengan ikut menentukan keputusan bersama. Pihak swasta hanya sebagai sponsor atau pelengkap kolaborasi dan belum adanya perjanjian kerja sama yang mengatur pihak-pihak terlibat dalam kolaborasi menjadi faktor hambatan struktur sosial.

3.2.2. Faktor Kultural

Faktor kultural atau budaya merupakan hambatan bagi kolaborasi karena adanya kecenderungan untuk ketergantungan pada pemimpin dan tidak berani mengambil terobosan atau resiko. Kolaborasi yang efektif mensyaratkan bagi Aparatur pemerintahan untuk memiliki keterampilan dan kesediaan berbaaur dengan kemitraan melalui komunikasi yang fleksible.

Faktor kultural ini erat kaitannya dengan budaya kerja sumber daya manusia yang terlibat kolaborasi dalam pengkoordinasian objek wisata Danau

Sipin. Faktor kultural atau budaya menjadi salah satu faktor penghambat kolaborasi yang dibangun. Hal ini karena adanya budaya kerja yang masih bersifat *top down* antara Pemerintah, swasta dan masyarakat. Faktor budaya sejalan dengan faktor struktur sosial yang menjelaskan tingkatan hubungan dari pihak terlibat kolaborasi. Adanya dominasi pemerintah dalam kolaborasi yaitu Dinas Pariwisata Kota Jambi membuat sedikitnya ruang untuk pihak swasta yaitu Café Hello Sapa untuk bergabung dalam proses tersebut. Budaya kerja yang bersifat *top down* dimana Dinas Pariwisata Kota Jambi menjalani program dan kebijakan sesuai dengan yang dibuat oleh Pemimpin sehingga kesempatan pihak swasta untuk ikut terlibat kolaborasi sulit dilakukan karena adanya prosedur serta tujuan yang tidak sejalan.

3.2.3. Faktor Kepentingan Pemerintah

Faktor kepentingan pemerintah berkaitan dengan faktor politik kepentingan diantara masing-masing pihak terlibat. Kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi dari pemimpin untuk mencapai tujuan politik yang kompleks dan memiliki pro kontra. Hal ini bisa berpeluang untuk menimbulkan konflik satu sama lain dalam kolaborasi.

Terkait kolaborasi dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin, faktor kepentingan pemerintah memang menjadi salah satu faktor yang menghambat jalannya kolaborasi . adanya faktor kepentingan tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Jambi yaitu Nanang Sunarya bahwa ada tumpang tindih kewenangan dimana pengelolaan objek wisata Danau Sipin yang terbagi menjadi dua yaitu oleh Dinas Pariwisata

Kota Jambi dan Dinas Pariwisata Provinsi Jambi. Proses tersebut terjadi karena klaim kepemilikan lahan yang digunakan untuk pembangunan objek wisata Danau Sipin ada milik Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi, sehingga kewenangan tersebut memisahkan pengelolaan dan pembuatan kebijakan untuk pembangunan objek wisata Danau Sipin.

Adanya tumpang tindih kewenangan tersebut membuat kolaborasi menjadi tidak berjalan efisien karena melibatkan banyak pihak serta mendominasi pihak Pemerintah, sehingga terkesan kolaborasi tersebut tidak memiliki tujuan yang sama karena dibatasi oleh kewenangan masing-masing pihak. Pada instansi yang terlibat, pelaksanaan tugas sesuai fungsinya masing-masing, meskipun dalam satu kesatuan kolaborasi untuk berkoordinasi mengelola objek wisata Danau Sipin.

Berdasarkan tersebut, dapat dikatakan bahwa ada komitmen bersama untuk kolaborasi dalam koordinasi objek wisata Danau Sipin, tetapi komitmen tersebut tidak tertuang secara tertulis dalam kesepakatan bersama dan hanya tertuang pada Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Jambi. Pihak terlibat memahami bahwa koordinasi objek wisata Danau Sipin harus dilakukan agar terciptanya kawasan wisata yang dapat mengembangkan potensi nilai sejarah, wisata, dan ekonomi dari masyarakatnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses kolaborasi yang dilakukan dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan proses *Collaborative Governance*. Adanya beberapa proses kolaborasi yang belum berjalan seperti upaya membangun kepercayaan, serta membangun komitmen karena klaim pengelolaan objek wisata Danau Sipin yang terbagi menjadi dua membuat proses kolaborasi tersebut sulit dilakukan untuk membangun kepercayaan antar pihak terlibat serta komitmen kolaborasi yang juga belum dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Sedangkan untuk proses kolaborasi lainnya yaitu dialog tatap muka, proses saling memahami serta Hasil sementara sudah mulai berjalan dengan menghasilkan tujuan kolaborasi yaitu kesepakatan pengelolaan objek wisata Danau Sipin yang akan diberikan pada BUMD Siginjai Sakti sebagai pengelola. Sayangnya rencana ini masih dalam tahap dikondisikan untuk pelaksanaannya.
- b. Faktor Penghambat Hubungan *Collaborative Governance* dalam Pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin yaitu ada tiga. Pertama, Faktor Struktur Sosial dimana tidak adanya perjanjian pembagian kerja sama dalam kolaborasi atau MOU untuk kesepakatan kerja sama sehingga masih Pemerintah mendominasi hubungan kolaborasi. Kedua, Faktor Budaya yaitu

adanya budaya kerja yang bersifat *Top Down* membuat keputusan bersama hanya dilakukan oleh Pemerintah yaitu Dinas Pariwisata Kota Jambi bersama Pemimpin dalam rencana pengelolaan objek wisata Danau Sipin yang akan diberikan oleh BUMD Siginjau Sakti sehingga keterlibatan swasta masih terbatas. Ketiga, Faktor Kepentingan Pemerintah yaitu adanya tumpang tindih kewenangan dalam dua pengelolaan oleh Dinas Pariwisata Kota Jambi dan Dinas Pariwisata Provinsi Jambi.

4.2 Saran

- a. Dibutuhkan kebijakan yang dapat mengatur ruang kolaborasi menjadi lebih maksimal, terutama bagi pihak swasta dan masyarakat dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah. Terkait kolaborasi dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin, dibutuhkan peran swasta dan masyarakat yang lebih maksimal. Peran swasta dan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan seperti yang telah direncanakan dalam Forum OPD untuk BUMD Siginjau Sakti dengan sistem diberlakukannya tiket masuk atau parkir, pembuatan acara menarik, kerja sama biro travel dan kegiatan lainnya di Danau Sipin Kota Jambi. Pengelolaan wisata yang profesional dapat berjalan melalui koordinasi dari berbagai pihak dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, serta daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

- b. Pertama, dibuatnya MoU baru dan perjanjian kerjasama antar pihak terlibat, sehingga masing-masing pihak memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Kedua, Pembentukan wadah atau forum komunikasi yang rutin dilakukan baik oleh Pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Ketiga, Pengelolaan wisata dilakukan menjadi satu agar terawat dan mendapat hasil.

Daftar Pustaka

Buku

- Creswell, W John. (2018). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- H, Laode Syaiful Islami. (2018). *Collaborative Governance konsep dan aplikasi*. Yogyakarta : DEEPUBLISH.
- Isdarmanto. (2017). *Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta : Gerbang media aksara dan STIPRAM Yogyakarta.
- Muharto. & Arisandy, A. (2016). *Metode Penelitian Sistem Informasi : mengatasi kesulitan mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian*. Yogyakarta: Deepublish
- Sarundajang, S.H. (2005). *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Wijaya Candra , Muhammad Rifa'I. (2016). *Dasar-dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.

Karya Ilmiah

- Ansell, Criss & Alison Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. University of California, Berkeley. Journal of Public Administration Research and Theory.
- Dewi, Trisuma Ratna. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil*. Tesis. Magister Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret.
- Febrian, Ade Anggi. (2016). *Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan*. Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi. Vol 11 No 1.
- Gesi Burhanuddin, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya, (2019). *Manajemen dan Eksekutif*, Jurnal Manajemen, Vol 3 No 2.
- Ihsan Mohammad, Rosyid Gary Yuesa, Siregar Ade Perdana. (2009). *Strategi Positioning dan Citra Destinasi Objek Wisata Air Danau Sipin Jambi*. Jurnal Manajemen dan Sains. Vol 4 No 2.

- Kristian, Yudi. (2017). *Pengelolaan objek wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat di Danau Aco Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung*. Volume 5 No 1.
- Kurniawan, fandy. Soesilo Zauhar. Hermawan. *Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata. Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1 No 1.
- Meiza, Nur. (2014). *Analisis Pengembangan Obyek Wisata Alam di Resort Balik Bukit Pekon Kubu Perahu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*. Skripsi Jurusan Pertanian Universitas Lampung.
- Okta, Fenny. (2016). *Upaya Komunikasi Interpersonal Kepala Desa Dalam Memediasi Kepentingan Pt. Bukit Borneo Sejahtera Dengan Masyarakat Desa Long Lunuk*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 4 No 1.
- Rudy, Gde Dewa. I Dewa Ayu Dwi Mayasari. (2019). *Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*. Jurnal Kertha Wicaksana. Vol 13 No 2.
- Saragi, Nurmaulida. Abdullah. (2018). *Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Volume 6 No 2.
- Sukarno, Frenly. (2016). *Koordinasi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Nasional Kayan Mentarang di Desa Tanjung Lapang Kilometer Delapan Kabupaten Malinau*. Jurnal Pemerintahan Integratif. Vol 4 No 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Peraturan Daerah Kota Jambi No 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2023.

Website

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. 2018. *Danau sipin merupakan konsep wisata ekologis danau alami yang ada di Kota Jambi*. <https://jambikota.go.id/new/2019/02/27/danau-sipin-konsep-wisataekologis-danau-alami-di-kota-jambi/>.

- Kerinci Time. 2020. *Seorang warga babak belur lantaran rebutan lahan parkir di Danau Sipin*. <https://kerincitime.co.id/seorang-warga-babak-belur-lantaran-rebutan-lahan-parkir-di-danau-sipin.html>.
- Purnomo. 2019. *Proyeksi devisa pariwisata indonesia 2019 tembus 18 miliar dolar AS*. <https://www.obsessionnews.com/proyeksi-devisa-pariwisata-indonesia-2019-tembus-18-miliar-dolar-as/>.
- Saputra, Eri. 2020. *Warga kota jambi yang tersakiti dibalik keindahan Danau Sipin*. <https://www.jambiseru.com/jambi/2020/17/02/warga-kota-jambi-yang-tersakiti-di-balik-keindahan-danau-sipin>.
- Thaib, Hiramshyah S. (2018). *Strategi Pengembangan Kepariwisata Indonesia*. https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Sosialisasi%20SBN/5.%20Creative%20and%20Innovative%20Financing%20Forum_Strategi%20dan%20Kebijakan%20Pengembangan%20Sektor%20Pariwisata.pdf.
- Wan. 2020. *Baru sebulan resmi difungsikan bangunan skateboard danau sipin rusak*.: <https://www.jektv.co.id/read/2020/01/14/542/baru-sebulan-resmi-difungsikan-bangunan-skateboard-danau-sipin-retak>.
- Yos. 2021. *Walikota Jambi Apresiasi CSR Bank Jambi Untuk Pembangunan RTP Danau Sipin*. <https://jambiekspres.co.id/read/2021/03/23/42835/walikota-jambi-apresiasi-csr-bank-jambi-untuk-pembangunan-rtp-danau-sipin>.
[diakses : 31 Maret 2021]

LAMPIRAN 1

Surat Izin Wawancara

Surat izin penelitian untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian km. 15, Mendalo Indah, Jambi, Kode Pos 36361
 Telp. (0741) 583454, 583456/email:
 hukum@unj.ac.id/web: <http://www.fh.unja.ac.id>

Nomor : 3721 /UN21.4/KM.05.01/2021
 Perihal : Pengantar izin penelitian dan permintaan data skripsi
 10 SEP 2021

Yth. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

Di
Tempat

Dengan hormat, kami mengharapkan bantuannya untuk dapat memberikan izin penelitian dan permintaan data kepada mahasiswa :

Nama : Sherin Yulia Hutami
 Nomor Induk Mahasiswa : H1A117052
 Program Kekhususan : Ilmu Pemerintah

Sehubungan dengan penulisan Skripsi Yang Berjudul "Penerapan Collaborative Governance dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi".

Setelah mahasiswa tersebut diatas melakukan penelitian dan permintaan data, mohon kiranya dapat mengirimkan surat kepada kami bahwa mahasiswa tersebut benar melakukan penelitian.

Demikian atas bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
 Kerjasama dan Sistem Informasi

 Dr. Muskhob, S.H., M.Hum.
 NIP. 196512041990032001

Surat Izin penelitian untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian km. 15, Mendalo Indah, Jambi, Kode Pos 36361
 Telp. (0741) 583454, 583456/email:
 hukum@unja.ac.id/web http://www.fh.unja.ac.id

Nomor : **3021 /ÜN21.4/KM.05.01/2021**
 Perihal : Pengantar izin penelitian dan permintaan data skripsi

10 SEP 2021

Yth. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

Di
Tempat

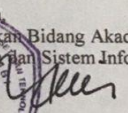
Dengan hormat, kami mengharapkan bantuannya untuk dapat memberikan izin penelitian dan permintaan data kepada mahasiswa :

Nama : Sherin Yulia Hutami
 Nomor Induk Mahasiswa : H1A117052
 Program Kekhususan : Ilmu Pemerintah

Sehubungan dengan penulisan Skripsi Yang Berjudul "Penerapan Collaborative Governance dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi".

Setelah mahasiswa tersebut diatas melakukan penelitian dan permintaan data, mohon kiranya dapat mengirimkan surat kepada kami bahwa mahasiswa tersebut benar melakukan penelitian.

Demikian atas bantuannya diucapkan terima kasih.


 an Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
 Kerjasama dan Sistem Informasi
Dr. Musriban, S.H., M.Hum.
 NIP. 196512041990032001

Surat Izin penelitian untuk Kelompok Sadar Wisata Pulau Kembang


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian km. 15, Mendalo Indah, Jambi, Kode Pos 36361
 Telp. (0741) 583454, 583456/email:
 hukum@unj.ac.id/web: <http://www.fh.unja.ac.id>

Nomor : **3821 /UN21.4/KM.05.01/2021**
 Perihal : Pengantar izin penelitian dan permintaan data skripsi 10 SEP 2021

Yth. Kelompok Sadar Wisata Pulau Kembang
 Di
 Tempat

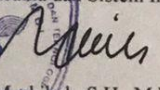
Dengan hormat, kami mengharapkan bantuannya untuk dapat memberikan izin penelitian dan permintaan data kepada mahasiswa :

Nama : Sherin Yulia Hutami
 Nomor Induk Mahasiswa : H1A117052
 Program Kekhususan : Ilmu Pemerintah

Sehubungan dengan penulisan Skripsi Yang Berjudul "Penerapan Collaborative Governance dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi".

Setelah mahasiswa tersebut diatas melakukan penelitian dan permintaan data, mohon kiranya dapat mengirimkan surat kepada kami bahwa mahasiswa tersebut benar melakukan penelitian.

Demikian atas bantuannya diucapkan terima kasih.


 an. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
 Kerjasama dan Sistem Informasi

 Dr. Muskipah, S.H., M.Hum
 NIP. 196512041990032001

Surat keterangan telah melaksanakan penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

	PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Jl. Raden Mattaher Kec. Jambi Timur Kota Jambi Telp. 0741-41427	
---	--	---

SURAT KETERANGAN
Nomor: PEG.11/582/DPK/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama	: Sherin Yulia Hutami
Jenis Kelamin	: Perempuan
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
NIM	: H1A117052

Telah melakukan penelitian/pengambilan data dengan metode wawancara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi yang akan dipergunakan untuk melengkapi penyusunan skripsi yang berjudul "*Penerapan Collaborative Governance dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, 13 Oktober 2021

An. Kepala Dinas
Kepala Bidang Daya Tarik Destinasi
Pariwisata


NANANG SUNARYA S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700326 199702 1 001

Surat keterangan telah melaksanakan penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 JAMBI		Telp. (0741) 445054, 445056 Fax. (0741) 445054
Jambi, 21 Oktober 2021			
Nomor : S- 499 /DISBUDPAR-1.1/X/2021 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Persetujuan Izin Penelitian dan Permintaan Data Skripsi	Kepada Sdr, Sherin Yulia Hutami di- Jambi		
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 3821/UN21.4/Km.05/01/2021 tanggal 10 September 2021 Perihal : Pengantar Izin Penelitian dan Perintaan data Skripsi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kami pada prinsipnya setuju memberi Izin Penelitian dan Permintaan Data Skripsi sehubungan dengan data yang dibutuhkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Bidang Destinasi Pariwisata. 2. Diharapkan data yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.			
 PIK KEPALA DINAS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI * DR. SRI PURNAMA SYAM, S.ST.,M.Sn Pembina Tk. I NRP 19650101 199403 2 010			

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kegiatan : Penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi

Tujuan : Mendeskripsikan *Collaborative Governance* yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi

1. Data Informan

Nama Informan :

Instansi :

Umur :

Jenis Kelamin :

Status :

No. Telepon :

2. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana Penerapan Prinsip proses *Collaborative Governance* dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin di Kota Jambi.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi :

1) Proses *Collaborative Governance*

- a). dialog tatap muka

(1) Apakah dalam Proses awal kolaborasi Dinas Pariwisata Kota Jambi melakukan dialog tatap muka secara langsung dengan pihak lain yang terlibat untuk menentukan tujuan serta masalah dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?

(2) Bagaimana bentuk dialog yang dilakukan?

b). Membangun Kepercayaan

(1) Bagaimana Dinas Pariwisata Kota Jambi membangun kepercayaan dengan pihak yang terlibat dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?

(2) Bagaimana bentuk kepercayaan antara Dinas Pariwisata Kota Jambi dengan Pihak lain yang terlibat ?

c). Proses dalam Mencapai Komitmen

(1) Apakah dalam proses kolaborasi terdapat komitmen yang saling menguntungkan bagi seluruh pihak terlibat dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?

(2) Bagaimana bentuk komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?

d). Pemahaman atas Keputusan Bersama

(1) Apakah dalam proses kolaborasi Dinas Pariwisata Kota Jambi memahami keputusan bersama tentang apa yang relevan dalam mengatasi masalah pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin ?

(2) Apa saja hal-hal yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Jambi secara bersama dalam mengatasi permasalahan Pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?

e). Hasil Sementara

- (1) Apa tujuan dan keunggulan kolaborasi secara nyata yang ditawarkan Dinas Pariwisata Kota Jambi dalam Pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?

Pedoman wawancara untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi :

1). Proses *Collaborative Governance*

a). Dialog Tatap Muka

- (1) Apakah dalam proses awal kolaborasi Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi melakukan dialog tatap muka secara langsung dengan pihak lain yang terlibat untuk menentukan tujuan dan masalah dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?
- (2) Bagaimana bentuk dialog yang telah dilakukan ?
- (3) Apa saja hasil yang di dapatkan dari dialog tatap muka tersebut?
- (4) Apakah dalam proses dialog tersebut mengalami hambatan?

b). Membangun Kepercayaan

- (1) Bagaimana Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi membangun kepercayaan dengan pihak-pihak terlibat dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?
- (2) Bagaimana bentuk kepercayaan antar Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dengan pihak-pihak yang terlibat?

c). Proses dalam mencapai komitmen

(1) Apakah dalam proses kolaborasi terdapat komitmen untuk saling menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?

(2) Bagaimana bentuk komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin ?

d). Pemahaman atas Keputusan Bersama

(1) Apakah dalam proses kolaborasi Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi saling memahami tentang apa yang sesuai dalam mengatasi masalah yang ada dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin ?

(2) Apa saja hal-hal yang dilakukan secara bersama dalam mengatasi permasalahan tersebut?

e). Hasil Sementara

(1) Apa tujuan dan keunggulan kolaborasi secara nyata yang dilakukan Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam Pengkoordinasian Objek wisata danau sipin?

(2) Bagaimana kontribusi dari seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan solusi penyelesaian masalah pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?

Pedoman wawancara untuk POKDARWIS Pulau Kembang :

1). Proses *Collaborative Governance*

a). dialog tatap muka

(1) Apakah dalam Proses awal kolaborasi Pokdarwis melakukan dialog tatap muka secara langsung dengan disparbud kota jambi untuk menentukan tujuan serta masalah dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?

(2) Bagaimana bentuk dialog yang dilakukan?

(3) Apa saja hasil yang di dapat dari dialog tatap muka tersebut?

(4) Apakah ada hambatan dalam proses dialog tersebut?

b). Membangun Kepercayaan

(1) Bagaimana Pokdarwis membangun kepercayaan dengan pihak yang terlibat dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?

(2) Bagaimana bentuk kepercayaan antara pokdarwis dan Dinas Pariwisata Kota Jambi?

c). Proses dalam Mencapai Komitmen

(1) Apakah dalam proses kolaborasi terdapat komitmen yang saling menguntungkan bagi seluruh pihak terlibat dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?

(2) Bagaimana bentuk komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?

d). Pemahaman atas Keputusan Bersama

(1) Apakah dalam proses kolaborasi pokdarwis memahami keputusan bersama tentang apa yang relevan dalam mengatasi masalah pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin ?

- (2) Apa saja hal-hal yang dilakukan pokdarwis secara bersama dengan disparbud kota jambi dalam mengatasi permasalahan Pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?

e). Hasil Sementara

- (1) Apa tujuan dan keunggulan kolaborasi secara nyata yang ditawarkan pokdarwis dalam Pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?
- (2) Bagaimana peran pokdarwis dalam memberikan solusi penyelesaian masalah dalam pengkoordinasian objek wisata Danau Sipin?

LAMPIRAN 3

Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Bapak Nanang sebagai Kabid Destinasi wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi



Wawancara dengan Ibu Fatimah sebagai Kasi Pengembangan Kawasan Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi



Wawancara dengan bapak John Herman sebagai Ketua POKDARWIS Pulau Kembang di Danau Sipin Kota Jambi



Wawancara dengan Masyarakat Danau Sipin yaitu salah satunya Bapak Pendi pemilik usaha Ketek hias



Pemandangan di Dermaga Perahu Ketek Danau Sipin Kota Jambi



Fasilitas di objek wisata Danau Sipin Kota Jambi





CURRICULUM VITAE



Penulis bernama lengkap Sherin Yulia Hutami, dilahirkan di Jambi pada tanggal 19 Juli 1999. Penulis merupakan warga negara Indonesia dan beragama Islam. Penulis tinggal di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Penulis lahir dari rahim seorang Ibu yang bernama Suyatmi dan Ayah yang bernama Tugiman. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Dengan dua adik Perempuan bernama Meisya Dwi Anjani dan Ananda Aqilah Zahra. Pada tahun 2006 penulis masuk Sekolah Dasar dan menyelesaikan pendidikan di SD N 84/IX Kasang Lopak Alai dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Model Kota Jambi dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014. Pada tahun yang sama saat penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2014/2015 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Man Model Kota Jambi dengan Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial (IPS) dan lulus pada tahun 2017. Ditahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan tinggi dan menimba ilmu di Universitas Jambi pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Pemerintahan.